

LAPORAN PENELITIAN

**PERSEPSI PEREMPUAN BERKARIR DI LINGKUNGAN UPI
TENTANG KONSEP KESETARAAN GENDER**

Oleh

Dra. Sofi Sufiarti

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian yang berwawasan gender yang bertujuan untuk mengetahui persepsi perempuan berkarir di lingkungan UPI mengenai konsep kesetaraan gender .

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perempuan berkarir di lingkungan UPI, sedang sampel diambil secara random berdasarkan klasifikasi tertentu dan diambil dari tiga fakultas.. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik statistik persentase. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kalangan perempuan berkarir di lingkungan UPI secara keseluruhan mempunyai persepsi yang positif terhadap konsep kesetaraan gender. Dalam hal pada jawaban adanya kesetaraan gender, perlunya perempuan diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam kegiatan pembangunan serta kesetujuannya terhadap adanya penerapan pengarusutamaan gender menunjukkan bahwa pada kalangan perempuan berkarir di lingkungan UPI telah berwawasan gender. Walaupun demikian jawaban yang diperoleh masih belum menyeluruh, dalam hal pengertian gender masih ada pemahaman yang beragam. Demikian juga dalam hal apabila perempuan berkiprah di bidang politik masih ada yang tidak setuju., meskipun persentasenya kecil Alasan ketidaksetujuan adalah paling banyak menyebutkan karena banyak menyita waktu untuk keluarga..Hal ini tidak seharusnya terjadi apabila telah memahami konsep gender..Kondisi ini juga tidak terlepas dari pandangan stereotipe bahwa politik itu urusan laki-laki. Laki-laki ditempatkan pada wilayah politik dan publik dalam kehidupan sosial, sedang perempuan tetap diasosiasikan dengan keluarga. Saran yang dikemukakan adalah mengadakan sosialisasi gender melalui penataran-penataran ataupun pelatihan-pelatihan untuk lebih meningkatkan tentang pemahaman konsep kesetaraan gender.

Kata kunci : persepsi, konsep kesetaraan gender.

B A B I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam kebijakan dan strategi mengenai pemberdayaan perempuan dalam Agenda Pembangunan Nasional 2004-2009 dicantumkan tentang visi dan misi Pemberdayaan Perempuan. Visi pemberdayaan perempuan adalah mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan visi tersebut perlu dilaksanakan enam misi pemberdayaan perempuan yaitu 1) meningkatkan kualitas hidup perempuan, 2) memajukan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik, 3) penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, 4) meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak, 5) meningkatkan pelaksanaan dan memperkuat kelembagaan PUG, serta 6) meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan program pembangunan pemberdayaan, telah pula ditetapkan arah kebijakan yang mencakup: 1)Memajukan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik, 2) meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta program-program lain untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumberdaya kaum perempuan, 3) meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak,4) menyempurnakan perangkat hukum pidana yang lebih lengkap dalam melindungi setiap individu dari kekerasan dalam rumah tangga 5) meningkatkan kesejahteraan dan

perlindungan anak, 6) memperkuat kelembagaan dan jaringan PUG dan anak, termasuk ketersediaan data dan peningkatan partisipasi masyarakat

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi yang benar tentang konsep kesetaran dan keadilan gender merupakan pra syarat untuk dapat dilaksanakannya peningkatan partisipasi dan peran perempuan diberbagai bidang pembangunan. Diduga bahwa masyarakat saat ini kurang memiliki pemahaman yang memadai tentang konsep gender dan kesetaraan gender. Bertolak dari dugaan tersebut kiranya perlu diadakan suatu penelitian yang berkaitan dengan pemahaman konsep kesetaran gender. Bilamana hal itu terbukti maka perlu dilakukan langkah-langkah sosialisasi tentang konsep gender, kesetaran gender dan kebijakan pengarusutamaan gender.

B. PERUMUSAN MASALAH.

Upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaran gender dilakukan melalui kebijakan dalam rangka melaksanakan pengarusutamaan gender disemua bidang pembangunan melalui Inpres No. 9 tahun 2000. Ini berarti bahwa instruksi ini perlu diimplementasikan. Dengan demikian pemahaman mengenai konsep keadilan dan kesetaran gender adalah merupakan prasyarat bagi pelaksanaan Inpres tersebut. Sementara disisi lain diduga konsep gender masih banyak belum dikenal dalam masyarakat. Berkaitan dengan kondisi ini maka peneliti merumuskan masalah penelitian mengenai persepsi perempuan berkarir di lingkungan UPI yang merupakan masalah pokok dalam penelitian ini yaitu :

sejauh mana gambaran umum persepsi perempuan berkarir di kalangan UPI tentang konsep kesetaraan dan setaraan gender .

Secara lebih khusus masalah penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang merupakan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana gambaran umum mengenai kedudukan perempuan berkarir di lingkungan UPI.
- b. Bagaimanakah gambaran umum mengenai pemahaman perempuan yang berkarir di lingkungan UPI mengenai konsep kesetaraan gender

C. TUJUAN PENELITIAN

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi tentang konsep kesetaraan dan keadilan gender pada kalangan perempuan berkarir di lingkungan UPI.

Sedang secara khusus tujuan penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui gambaran umum mengenai kondisi kedudukan perempuan berkarir di lingkungan UPI.
- b. Memperoleh gambaran umum mengenai pemahaman perempuan berkarir di lingkungan UPI mengenai konsep kesetaraan dan keadilan gender

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para penentu kebijakan perlunya perhatian serius terhadap aplikasi pemahaman konsep gender, kesetaraan gender dan kebijakan pengarusutamaan gender. Dalam arti

memperhatikan kebutuhan praktis dan strategis kaum perempuan. Disamping itu juga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perempuan berkarir untuk menyadari pentingnya memahami tentang konsep tentang gender, kesetaraan gender dan pengarusutamaan gender sebagai pegangan dalam kehidupan bermasyarakat. dalam upaya memecahkan masalah kesenjangan gender.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Persepsi

Istilah persepsi , banyak dikemukakan oleh para pakar, mereka memberi batasan-batasan mengenai istilah tersebut antara lain :

Sarlito Wirawan (1983 : 94) mengartikan persepsi sebagai a) suatu proses berfikir, b) proses pengambilan keputusan c) penafsiran terhadap obyek dan d) hasil dari stimulus.

Good, (1973 : 413) Persepsi dapat diartikan sebagai kesadaran individu akan obyek, kondisi atau hubungan-hubungan sebagai rangsangan sensoris

Setiap orang mempunyai persepsi, penafsiran tertentu, kesan tertentu terhadap obyek . Obyek yang sama dapat dilihat sebagai sesuatu yang berbeda-beda, sebab kesan yang ditangkap oleh rangsangan pancaindra dapat berbeda-beda. Penyebab dari perbedaan tersebut dapat terjadi karena latar belakang, pengalaman, pengetahuan, perasaan, pendidikan dan nilai-nilai serta kebiasaan di lingkungan masing-masing.

Demikian pula gambaran yang sudah baku tentang wanita (streotype), seolah-olah demikianlah adanya, tidak mudah untuk diubah. Hal ini merupakan pantulan dari anggapan yang sudah mengendap mungkin turun temurun berabad-abad, karenanya tak dipikirkan lagi dan diterima begitu saja, dipercaya dan diikuti. Sebagai contoh: wanita adalah mahluk yang lemah, lembut, manja. Wanita tidak mempunyai kemampuan untuk berprestasi baik dalam ilmu eksakta dll. Citra ini

sudah terpatrit dalam pikiran masyarakat, sukar merubahnya, walaupun pada kenyataannya kita dapat menunjuk adanya banyak yang pandai dalam ilmu eksakta.

Dalam masyarakat , kini anggapan-anggapan tersebut berkembang dan berubah terus menerus, tetapi perubahan tersebut biasanya berjalan lamban, membutuhkan suatu proses yang panjang, yang pada dasarnya adalah suatu proses belajar. Kedudukan dan peranan perempuan dalam pembangunan berkembang terus menerus, sehingga kemauan kaum wanita untuk belajar terus menerus, mengubah sikap dan tingkah lakunya dalam menjalankan peranannya dalam masyarakat juga berlangsung terus menerus.

Persepsi tentang peningkatan kedudukan dan peranan perempuan dalam pembangunan bangsa didasarkan pada pandangan bahwa perempuan adalah warganegara dan sumber daya insani pembangunan yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, tanggung jawab peranan dan kesempatan yang sama dengan laki laki dalam pembangunan di segala bidang termasuk kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kebijakan peningkatan kedudukan dan peranan perempuan pada hakekatnya diarahkan pada peningkatan kedudukan, peranan kemampuan, kemandirian serta ketahanan mental spiritual agar menjadi mitra sejajar pria yang selaras, serasi dan seimbang, sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dilihat dari sisi jumlah dan proporsi yang ada, posisi perempuan lebih besar dari laki-laki. Ini berarti bahwa perempuan dapat memberikan sumbangan

yang sebanding dengan laki-laki apabila mempunyai kemampuan yang setara. Sementara dilain pihak perempuan diletakkan dalam posisi yang lebih rendah, yang mengakibatkan kemampuan untuk berperan dalam pembangunan menjadi lebih kecil. Pada dasarnya perempuan dan laki-laki mempunyai kemampuan yang sama kecuali untuk fungsi reproduksinya. Sedangkan perbedaan yang ada disebabkan oleh streotipe yang secara turun temurun terbentuk dalam tatanan sosial budaya masyarakat. Sejalan dengan perubahan jaman, streotipe yang memarjinalkan perempuan dan meletakkan perempuan pada kedudukan yang lebih rendah, harus diubah karena tidak sesuai dengan kodrat manusia. Dalam upaya meningkatkan kondisi perempuan yang saat ini masih tertinggal, pemerintah telah menentukan kebijakan tentang kedudukan dan pemberdayaan perempuan dengan tujuan terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dalam setiap proses dan tahap pembangunan.

Strategi peningkatan peranan perempuan dalam perkembangannya selama ini lebih menekankan pada kerangka berfikir “wanita dalam pembangunan” (*Women IN Development = WID*), dan “Wanita dan Pembangunan” (*Women And Development = WAD*) yang lebih ditujukan pada masalah mengejar ketertinggalan wanita dibanding pria dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Penggunaan paradigma ini lebih banyak menghasilkan program / proyek khusus untuk wanita (*Specific Womens Programmes / Project*). Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa walaupun berdasarkan paradigma itu telah cukup banyak diperoleh berbagai kemajuan dalam peningkatan kedudukan dan peranan wanita dalam pembangunan, namun demikian upaya tersebut

dirasakan masih perlu dilanjutkan dan lebih dikembangkan, serta dimantapkan dan dipercepat dengan menggunakan paradigma baru yaitu gender dan pembangunan “*Gender And Development* “ = *GAD*, yang berupaya mendapatkan jalan untuk mengubah ketimpangan gender. Program GAD disetujui tahun 1990 hasil dari pertemuan di Vienna dengan strategi *gender mainstreaming*. GAD menekankan pentingnya perencanaan sensitif gender. Strategi yang terdapat pada GAD ialah bekerja ke arah terwujudnya keadilan berkenaan dengan dampak pembangunan. Suatu kerangka dasar konseptual baru yang memungkinkan identifikasi tujuan-tujuan dan penerapan program-program yang memenuhi harapan ini amat diperlukan. Pemikiran tersebut memunculkan ide untuk membawa wanita ke arus utama dan mengupayakan peningkatan kesadaran akan gender.

Masalah –masalah yang harus diatasi serta keterbatasan cara pendekatan GAD dalam setiap lingkungan nasional hendaknya disadari oleh para perencana dan pelaksana. Walaupun demikian menurut Sita van Bemmellen , (1995, hal. 178) GAD hanya mungkin berhasil jika bagian-bagian yang luas dari masyarakat, terutama pada badan-badan perencana dan badan-badan penentu kebijakan, maupun badan-badan pelaksana , jadi lebih sadar akan perbedaan-perbedaan dan ketimpangan-ketimpangan gender

Secara global disadari bahwa setiap kebijaksanaan dan strategi dalam pembangunan tidak selalu akan memiliki dampak, manfaat dan akibat yang sama terhadap laki-laki dan perempuan. Upaya untuk mewujudkan kondisi normatif dimana laki-laki dan perempuan mempunyai persamaan kedudukan, hak

kewajiban, tanggung jawab dan peranan serta kesempatan dalam berbagai bidang kehidupan dan setiap kegiatan dalam pembangunan, tidak mungkin dapat diwujudkan apabila penanganannya hanya ditujukan terhadap perempuan saja tanpa memperhatikan masalah hubungan laki-laki dan perempuan.

B. Konsep Gender.

Kata gender dalam bahasa Indonesia dipinjam dari bahasa Inggris secara harfiah “ gender “ berarti jenis kelamin, sama halnya dengan seks yang juga jenis kelamin. Untuk memahami konsep gender harus dibedakan antara kata gender dengan seks. Seks mengacu pada pengertian perbedaan biologis jenis kelamin yang merupakan kodrat Tuhan karenanya bersifat permanen serta tidak dapat dipertukarkan.

Sementara pengertian gender adalah sebagai berikut :

- Gender mengacu pada perbedaan jenis kelamin yang bukan bersifat biologis dan bukan kodrat Tuhan.
- Gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural.
- Gender adalah perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan kemajuan zaman.
- Gender adalah semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas lainnya.

- Gender menunjuk pada perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang “ *society constructed*”, jadi diciptakan oleh laki-laki dan perempuan itu sendiri melalui proses sosial budaya yang panjang. (Pelatihan kepemimpinan pengurus lembaga perempuan, 2002).

Dalam masyarakat tampak adanya pembagian dua golongan yang membedakan laki-laki perempuan. Hal ini dapat dilihat dari ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk mengidentifikasi dua jenis kelamin tersebut. Sebagai contoh misalnya perempuan dikenal dengan yang berkaitan dengan, bunga, , bulan, lemah, emosional, alam Sedangkan laki-laki berkaitan dengan kumbang, matahari, kuat, rasional, budaya..

Dari dikhotomi tersebut tampak dua sifat yang berlawanan. Lambang yang diberikan pada laki-laki lebih dinamis dibandingkan dengan lambang lambang yang diberikan pada perempuan. Lambang yang dimiliki laki-laki menguasai lambang-lambang yang dimiliki perempuan. Johnson dalam Darwis (2002:3) mengemukakan bahwa nilai-nilai budaya menempatkan kelaki-lakian diatas keperempuanan dan menilai laki-laki dan perempuan dengan kriteria yang berbeda. Identifikasi perempuan dengan alam menunjukkan kedekatannya dengan alam karena keterlibatannya dalam kegiatan reproduksi cenderung membatasi mereka pada fungsi-fungsi sosial tertentu seperti hubungan dengan anak. Pada akhirnya hubungan perempuan anak dan keluarga menempatkannya pada wilayah domestik. Laki-laki ditempatkan pada wilayah politik dan publik dari kehidupan sosial karenanya diidentifikasi dengan masyarakat dan publik, sedangkan perempuan tetap diasosiasikan dengan keluarga. Ciri dan sifat tersebut diatas

sebenarnya tidak permanen dalam arti bisa dipertukarkan , sebagai contoh ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, sebaliknya ada perempuan yang rasional, kuat. Melalui dialektika konstruksi gender yang tersosialisasikan secara evolusional, lama-lama mempengaruhi biologis seks, sehingga kaum laki-laki kemudian terlatih dan tersosialisasi dan termotivasi untuk menjadi sifat gender yang ditentukan masyarakat, yaitu secara fisik lebih kuat dan agresif, sementara perempuan harus lemah lembut. Proses sosialisasi dan rekonstruksi ini berlangsung secara mapan dan lama, yang akhirnya sulit dibedakan apakah sifat gender ini dikonstruksikan oleh masyarakat atau kodrat biologis yang ditentukan Tuhan. Namun demikian sepanjang sifat-sifat yang melekat pada kedua seks ini bisa dipertukarkan , maka sifat tersebut adalah hasil konstruksi masyarakat dan bukanlah kodrat.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa gender adalah perbedaan hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan sebagai konstruksi yang bersumber pada nilai sosial budaya, pada berbagai golongan atau kelompok masyarakat, memiliki identitas yang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh faktor ideologi, politik, ekonomi, sejarah, agama, budaya, adat istiadat dan etnik serta berubah ubah menurut waktu, tempat, lingkungan dan kemajuan

Nilai sosial budaya menentukan peranan stereotip, yaitu peranan yang dianggap cocok bagi laki-laki dan perempuan, sesuai dengan sifat-sifat biologis masing-masing didalam pembangunan termasuk kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sering menimbulkan kesenjangan hubungan laki-laki dan perempuan.

Adanya anggapan bahwa perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin serta tidak cocok menjadi kepala rumah tangga berakibatkan bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan, dan pekerjaan ini dinilai lebih rendah dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan lelaki dengan kategori pekerjaan bukan produktif sehingga tidak diperhitungkan dalam statistik ekonomi negara. Anggapan gender seperti itu membuat kaum perempuan sudah sejak dini disosialisasikan untuk menekuni peran gender mereka. Di lain pihak kaum lelaki tidak diwajibkan untuk menekuni berbagai jenis pekerjaan domestik. Bias gender inilah yang memperkuat pelanggaran secara kultural dan struktural beban kerja kaum perempuan.

“Bias” yang dalam bahasa Inggris diartikan sebagai “prasangka” yaitu pendapat atau anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui/ menyaksikan / menyelidiki sendiri. Secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti yang menyimpang.

Bias gender adalah cara pandang (idea) seorang perempuan terhadap laki-laki sesuai dengan anggapannya yang menyimpang, demikian juga sebaliknya. Prasangka itu sendiri mengandung arti terdapat hal yang tidak obyektif, jadi terdapat persepsi yang tidak obyektif pada diri perempuan maupun laki-laki terhadap lawan jenisnya.

Bias gender telah diyakini kebenarannya oleh laki-laki maupun perempuan dan diterima sebagai kodrat Tuhan yang tidak dapat diubah sehingga menjadi pedoman dalam bertingkah laku dalam keluarga maupun masyarakat yang lebih luas.

Perbedaan gender tidak menjadi masalah selama tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*).Namun ternyata perbedaan gender seringkali melahirkan ketidakadilan baik bagi laki-laki maupun perempuan Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.

Ketidakadilan Gender adalah bahwa :

- :1) Perlakuan tidak adil yang diberikan baik kepada laki-laki maupun perempuan.
- 2) Dalam banyak kasus perlakuan tidak adil banyak menimpa perempuan yang dialaminya baik di rumah, di tempat bekerja maupun di masyarakat.
- 3) Ketidakadilan gender tercipta karena : a) hubungan gender yang timpang b) diskriminasi gender. Dikonstruksikan oleh budaya dan melembaga / dilembagakan.
- 4) Apabila proses ketidakadilan gender terus berlanjut, kesetaraan gender tidak tercapai. (pelatihan kepemimpinan pengurus lembaga perempuan, 2002)

Manifestasi ketidakadilan gender menurut beberapa pakar (Zoerani 2001: 2) timbul dalam bentuk :

- 1) Kekerasan (*violence*)
- 2) Marginalisasi. Perempuan
- 3) Subordinasi
- 4) Pembentukan stereotip atau pelabelan negatif
- 5) Beban kerja lebih panjang dan lebih banyak
- 6) Beban ganda

C. Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender adalah kesetaraan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut

Jadi kesetaraan gender adalah menerima dan menilai secara setara :

- 1) perbedaan antara laki-laki dan perempuan
- 2) perbedaan peran yang dipegang oleh laki-laki dan perempuan dalam masyarakat
- 3) memahami bahwa perbedaan kondisi hidup laki-laki dan perempuan pada dasarnya karena fungsi melahirkan pada perempuan.
- 4) Menerima perbedaan laki-laki dan perempuan sebagai hikmah
- 5) Kesetaraan gender tidak sinonim dengan persamaan
- 6) Kesetaraan gender berarti sederajat dalam keberadaan, sederajat dalam keberdayaan dan keikutsertaan disemua bidang kehidupan domestik dan publik (pelatihan kepemimpinan pengurus lembaga perempuan, 2002)

D. Pengarusutamaan gender, (PUG), gender mainstreaming.

Pengarusutamaan gender yang saat ini menjadi garis kebijakan yang ditegaskan melalui INPRES No. 9 tahun 2000. Dalam Inpres tersebut dinyatakan

bahwa pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.

Tujuan pengarusutamaan gender ini adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pengarusutamaan gender telah diadopsi secara resmi di Indonesia sejak tahun 2000 dengan keluarnya Instruksi Presiden atau Inpres No.9 Tahun 2000. Kemunculan dasar hukum ini merupakan satu bentuk komitmen pemerintah Indonesia untuk mengikuti kesepakatan Internasional, serta desakan masyarakat sipil agar pemerintah melakukan tindakan-tindakan konkrit dan sistematis dalam mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender

Konsep PUG pertama kali muncul saat Konferensi PBB untuk Perempuan IV di Beijing tahun 1995. PUG terjemahan dari bahasa Inggris *gender mainstreaming*, Menurut definisi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB *gender mainstreaming* adalah strategi agar kebutuhan dan pengalaman perempuan dan laki-laki menjadi bagian tak terpisahkan dari desain, Implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan dan program dalam seluruh lingkup politik, ekonomi, dan sosial sehingga perempuan dan laki-laki sama-sama mendapatkan keuntungan, dan ketidakadilan tak ada lagi.

Titik tolak utama dalam PUG adalah analisa yang menyeluruh terhadap situasi pembangunan. Menurut Hartian Silawati (2006: 21) ada tiga prinsip utama dibelakang PUG yaitu :

a. Menumbuhkan individu sebagai manusia seutuhnya, prinsip ini berasal dari paradigma *politics of difference* (politik perbedaan) yang melihat laki-laki dan perempuan sebagai orang yang mampu memikul tanggung jawab masing-masing. Kemanusiaan laki-laki dan perempuan harus mendapatkan penghargaan dan penghormatan yang sama kerana mereka sama-sama lahir sebagai manusia, yang berhak untuk hidup dengan mulia. Hal ini sesuai dengan prinsip Hak Azasi Manusia yang menganggap laki-laki dan perempuan sebagai manusia yang sama sama memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi.

b. Demokrasi. Perlu diselenggarakan forum-forum dimana perempuan dan laki-laki dapat menyuarakan kebutuhan dan aspirasinya . Merekalah yang bisa memastikan agar sumber daya dialokasikan berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan.

c. *Fairness, justice, dan equity.*

Inti dari prinsip *fairness, justice dan equity* (pemerataan, penegakan hukum dan kesetaraan) ini adalah yang disebut keadilan sosial. Inilah alasan utama mengapa PUG harus dilakukan. Prinsip ini mengakui adanya ketidakadilan sosial dalam pengalokasian sumber daya, yang akan memudahkan kita melakukan langkah-langkah untuk menghilangkannya.

Dari tiga prinsip diatas, jelas bahwa keadilan gender adalah nilai fundamental dalam pemenuhan dan promosi hak-hak asasi manusia.

Mengarusutamakan keadilan gender berarti membawa laki-laki dan perempuan ke dalam proses pengambilan keputusan tentang alokasi sumber daya dan manfaat pembangunan.

Menurut Hasyim Maulana.T (2006:52) manfaat PUG adalah :

- a. Pemerintah dapat bekerja lebih efisien dan efektif dalam menerbitkan kebijakan-kebijakan publik yang adil dan responsif gender, perempuan dan laki-laki.
- b. Kebijakan dan pelayanan publik serta program dan perundangan-undangan yang adil dan responsif gender akan membuahkan manfaat yang adil bagi semua rakyat perempuan dan laki-laki.
- c. PUG merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama dimasyarakat.
- d. PUG mengantar kepada pencapaian kesetaraan gender dan karenanya PUG meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah.
- e. Keberhasilan pelaksanaan PUG memperkuat kehidupan sosial politik dan ekonomi suatu bangsa.

E. Peranan Perempuan dalam Pembangunan

Tuntutan ekonomi yang semakin meningkat mendorong kaum wanita untuk melakukan peran ganda. Demikian juga peningkatan latar belakang pendidikan wanita sehingga aspirasi wanita untuk berperan tidak hanya di dalam rumah tangga tetapi juga di masyarakat. Peluang lainnya adalah permintaan

tenaga kerja di pasar kerja , sehingga semakin banyak wanita yang bekerja diluar rumah.

Banyaknya perempuan yang terjun ke dunia kerja didukung oleh faktor-faktor

- a. Makin tingginya tingkat pendidikan perempuan
- b. Meningkatnya kebutuhan hidup keluarga
- d. Perubahan sosial budaya seperti munculnya keinginan untuk memanfaatkan potensi perempuan, adanya fasilitas-fasilitas yang membantu pekerjaan rumah tangga seperti makanan instant, alat alat elektronik, *baby sitter*, pembantu rumah tangga

Dari segi positif bekerjanya perempuan diluar rumah dapat menumbuhkan kepercayaan diri pada perempuan, mengembangkan sikap positif terhadap dirinya sendiri. Sebaliknya bekerja juga membuat ibu tidak selalu ada pada saat ia dibutuhkan keluarga. Di lingkungan keluarga dengan ibu bekerja, anak terbiasa melihat mobilitas ibu dalam menjalankan peran gandanya. Mitos bahwa pekerjaan di luar rumah bagi wanita akan menggerogoti keutuhan keluarga , tetapi mitos ini sekaligus juga memberi tuntutan kepada wanita yang bekerja untuk tidak mengurangi fungsinya dalam keluarga.

Sehubungan dengan uraian diatas penelitian ini akan mengkaji bagaimana persepsi kalangan perempuan berkarir di lingkungan UPI mengenai konsep kesetaraan gender .

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Sesuai dengan permasalahan serta tujuan yang dikemukakan dalam penelitian ini yaitu untuk memperoleh gambaran umum mengenai persepsi perempuan berkarir di lingkungan UPI tentang konsep kesetaraan gender jadi dimaksudkan untuk memperoleh gambaran kondisi sekarang maka metode yang digunakan adalah metode deskriptif, dengan pendekatan kuantitatif.

B. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Teknik pengumpulan data tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa kuesioner merupakan alat yang efisien dan efektif dalam menjaring data yang obyektif.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa UPI Bandung. Dalam menetapkan sampel dengan mempertimbangkan tersedianya waktu dan dana maka peneliti dalam kesempatan ini menentukan sampel secara acak sebanyak dua fakultas yaitu: FIP, FPBS, serta Lembaga Penelitian yang dianggap dapat mewakili dari enam fakultas yang ada. Yang menjadi subyek penelitian / responden adalah ibu-ibu staf administrasi yang ada di kedua fakultas serta yang

ada di Lembaga Penelitian. Jumlah sampel seluruhnya berjumlah 30 orang dengan perincian 8 orang dari FPBS, 13 orang dari Lembaga Penelitian, serta 9 orang dari FIP.

D. Pengolahan data

Pengolahan data dianalisis secara kuantitatif dengan perhitungan persentase melalui tahapan : tabulasi, penafsiran data kuantitatif dan pembahasan. Dalam mentabulasi data yang terkumpul sesuai dengan tujuan penelitian, data kolektif tersebut ditabulasi secara keseluruhan dan kemudian dianalisis secara keseluruhan Hasil analisis ditampilkan dalam bentuk tabel-tabel distribusi frekuensi .Penafsiran data dalam penelitian ini berpedoman pada batasan presentase yang diperoleh dari hasil lokakarya jurusan Adpen FIP , IKIP yang dikutip oleh Supriadi (1994 : 74)

100 %	=	Seluruhnya
76 % - 99 %	=	Sebagian besar
51 % - 75 %	=	Lebih dari setengahnya
50 %	=	Setengahnya
26 % - 49 %	=	Kurang dari setengahnya
1 % - 25 %	=	Sebagian kecil
0 %	=	Tidak seorangpun

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis data.

Dari hasil analisis data yang diberikan responden melalui angket, diperoleh sejumlah jawaban mengenai topik-topik permasalahan yang diolah melalui tahapan : tabulasi, penafsiran data yang kemudian dikaji. Hasil analisis dijadikan dasar dalam menyusun temuan penelitian ini , yang kemudian ditarik kesimpulan penelitian serta saran-saran sehubungan dengan kesimpulan tersebut. Data yang diperoleh melalui angket ini adalah mengenai persepsi perempuan berkarir di lingkungan UPI mengenai konsep kesetaraan gender .

1. Mengenai jabatan responden, dari hasil pengolahan data dapat dikemukakan bahwa dari 30 orang sebagai sampel ternyata 30% menduduki jabatan , yaitu 20 % sebagai Kasubag., 6,67% sebagai Kepala Bagian Tata Usaha dan 3,33 % sebagai Kepala Pusat, selebihnya 70 % sebagai staf Tata Usaha.
2. Mengenai ketertarikan pada informasi yang berkaitan dengan masalah gender dari hasil analisis data dapat dikemukakan bahwa 90 % tertarik pada masalah gender, 10 % tidak tertarik .

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden tertarik terhadap masalah mengenai gender.

3. Jika tertarik terhadap masalah gender cara responden mendapatkan informasi dari data yang terkumpul yaitu 86,67% melalui majalah-majalah / koran, 36,67

% melalui membaca buku-buku, 20 melalui TV dan 16,67 % dengan ikut serta dalam kegiatan organisasi kewanitaan, serta 6,67% melalui internet.

Dari temuan diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar yang tertarik kepada masalah gender, cara mendapatkan informasinya adalah melalui membaca majalah / koran.

4. Pengertian gender bagi responden. Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa 53,34 % responden menyatakan bahwa gender adalah perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial dan bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian sebesar 33,33% responden menyatakan bahwa gender adalah kebebasan perempuan untuk berkiprah dalam berbagai aspek kegiatan masyarakat. Dan selebihnya (13,33%) responden menyatakan bahwa gender adalah jenis kelamin.

Dari temuan diatas dapat dikatakan bahwa pandangan mengenai pengertian gender bervariasi tetapi lebih dari setengah responden memberi pernyataan mengenai pengertian gender adalah bahwa gender adalah perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial yang bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman.

5. Mengenai pandangan kesetaraan gender, dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa sebagian besar responden (80 %) menyatakan bahwa kesetaraan gender adalah kemitrasejajaran antara perempuan dan laki-laki, 10% responden menyatakan bahwa kesetaraan gender adalah persamaan hak antara

perempuan dan laki-laki serta 10 % responden menyatakan tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki disegala bidang.

6. Mengenai pandangan ketidaksetaraan gender, dari data yang terkumpul ternyata lebih dari setengah responden yaitu 66.67% menyatakan bahwa pandangan ketidaksetaraan gender adalah ketidakberdayaan perempuan dalam bersikap dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian sebagian kecil responden yaitu 23,33% menyatakan bahwa ketidak setaraan gender adalah persepsi menang kalah antara perempuan dan laki-laki dan selebihnya yaitu 10% menyatakan bahwa ketidaksetaraan gender adalah sikap acuh tak acuh perempuan terhadap keberadaan dirinya .

7. Terhadap pandangan setuju atau tidak setuju terhadap konsep kesetaraan gender ternyata 70 % responden menyatakan setuju dengan adanya konsep kesetaraan gender, selebihnya 30 % menyatakan tidak setuju.

8 Alasan setuju terhadap adanya konsep gender, dari hasil pengolahan data ternyata setengahnya (50%) responden memberi alasan karena ada perasaan saling menunjang di segala bidang antara perempuan dan laki-laki, 13,33 % responden memberi alasan karena saling menghargai antara perempuan dan laki-laki, selebihnya 6.67 % responden memberi alasan karena menyadari kewajiban masing-masing.

Dari temuan diatas diperoleh gambaran bahwa paling banyak responden memberi alasan setuju terhadap kesetaraan gender adalah karena adanya perasaan saling menunjang di segala bidang antara perempuan dan laki-laki.

9. Apabila tidak setuju alasan yang dikemukakan responden adalah 23,33% karena laki-laki merasa berkurang kewibawaannya, 6,67% responden memberi alasan karena perempuan merasa tidak risi lagi menghadapi laki-laki.

10. Pendapat mengenai setuju tidaknya apabila perempuan banyak berkiprah dibidang politik. Ternyata dari hasil pengolahan data sebagian besar responden (76,67 %) menyatakan setuju apabila perempuan banyak berkiprah di bidang politik dan selebihnya 23,33 % tidak setuju

11. Alasan setuju apabila perempuan banyak berkiprah di bidang politik Dari hasil pengolahan data, kurang dari setengah responden (33,34 %) memberi alasan karena tidak ada dominasi antara perempuan dan laki-laki, kemudian juga kurang dari setengah responden lainnya yaitu sebesar 33,33% memberi alasan karena adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, dan selebihnya yaitu sebagian kecil responden lainnya 10 % memberi alasan karena perempuan merasa percaya diri. sejajar dengan laki-laki.

12. Sementara bagi yang tidak setuju apabila perempuan berkiprah di bidang politik dari hasil pengolahan data ternyata alasan yang diberikan adalah karena banyak menyerap waktu untuk keluarga (16,67%). Kemudian 6,67% responden memberi alasan karena percaya diri perempuan terlalu menonjol.

Dari uraian diatas dapat dikemukakan bahwa dari jumlah responden yang tidak setuju apabila perempuan banyak berkiprah dibidang politik paling banyak responden memberi alasan ketidaksetujuannya adalah karena banyak menyerap waktu untuk keluarga.

13. Pendapat responden kalau istri lebih besar penghasilannya dari suami

Dari hasil pengolahan data ternyata lebih dari setengah responden (56,67%) menyatakan salut dan bangga. Kemudian kurang dari setengahnya (33,33%) menyatakan tetap berharap suami lebih besar penghasilannya daripada istri, selebihnya 6,67 % menyatakan istri suka sombong, dan 3,33% tidak perlu dipersoalkan.

14. Pendapat responden dalam hal apabila perempuan menjadi pejabat pada suatu instansi . Dari hasil pengolahan data ternyata setengah dari jumlah responden (50 %) menyatakan salut dan bangga, kemudian kurang dari setengahnya (46,67%) menyatakan biasa-biasa saja, serta selebihnya yaitu 3,33% menyatakan risi dan kaku. Dari temuan diatas dapat dikatakan bahwa jawaban responden bervariasi. Yang paling banyak adalah menyatakan salut dan bangga apabila perempuan menjadi pejabat pada suatu instansi.

15. Pendapat responden apabila dalam suatu keluarga istri lebih tinggi kedudukan sosialnya dari suami.

Dari hasil pengolahan data yang terkumpul ternyata sebagian besar responden (93,33 %) menyatakan bahwa suami tetap dominan sebagai kepala keluarga, selebihnya yaitu sebagian kecil (6,67 %) menyatakan bahwa istri lebih dominan dari suami

16. Dalam hal apabila Ibu sudah memahami kesetaraan gender, sikap yang dibutuhkan dalam pembinaan rumah tangga . Dari hasil pengolahan data ternyata lebih dari setengah responden (76,67%) menyebutkan bapak tetap dihormati sebagai kepala keluarga. Selebihnya kurang dari setengahnya (23,33%) menyatakan bahwa pengambilan keputusan terakhir tetap pada bapak.

17. Dalam hal perlu tidaknya perempuan diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam kegiatan pembangunan. Dari hasil pengolahan data yang terkumpul ternyata seluruh responden (100%) menyatakan bahwa perempuan perlu diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam kegiatan pembangunan. Jadi tidak seorangpun dari responden yang menyatakan tidak diperlukan

18. Alasan responden apabila perempuan perlu diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam kegiatan pembangunan. Dari hasil pengolahan data ternyata diperoleh jawaban yang bervariasi, kurang dari setengah responden (43,34 %) memberikan alasan bahwa hal tersebut diperlukan karena perempuan sama haknya dengan laki-laki. Kurang dari setengah responden lainnya yaitu 33,33% menyebutkan alasannya ialah bahwa persoalan pemberdayaan perempuan pada masyarakat Indonesia telah menjadi doktrin negara. Dan selebihnya yaitu sebesar 23,33% menyebutkan alasannya bahwa perempuan merupakan bagian terbesar dari penduduk Indonesia sehingga perlu diberikan kesempatan yang sama dalam kegiatan pembangunan.

19. Pendapat responden tentang kebijakan pengarusutamaan gender . Dari hasil pengolahan data diperoleh hasil bahwa lebih dari setengah responden (60 %) menyebutkan bahwa pengarusutamaan gender adalah menetapkan langkah-langkah strategis untuk pengintegrasian program pemberdayaan perempuan dalam berbagai sektor pembangunan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Selebihnya sebagian kecil responden yaitu 23,33% menyebutkan bahwa kebijakan pengarusutamaan gender adalah meningkatkan sikap yang penuh inisiatif kaum

perempuan. Dan sebagian kecil lainnya yaitu sebesar 16,67% menyebutkan pengarusutamaan gender adalah meningkatkan fisik dan intelektual kaum perempuan.

20. .Dalam hal setuju tidaknya responden terhadap adanya penerapan pengarusutamaan gender apabila responden telah bekerja . Dari hasil pengolahan data ternyata sebagian besar responden yaitu 93,33% setuju terhadap adanya penerapan pengarusutamaan gender apabila responden telah bekerja. Sementara yang tidak setuju terhadap penerapan pengarusutamaan gender adalah sebesar 6,67%.

21. Mengenai apakah instansi tempat ibu bekerja sudah memberi peran yang signifikan. Dari hasil pengolahan data 90% memberi jawaban ya, selebihnya 10% menjawab belum.

22. Mengenai pendapat responden tentang isue perempuan yang menuntut 30% posisi jabatan di instansi tempat bekerja. Dari hasil pengolahan data ternyata lebih dari setengah responden yaitu sebesar 66,67% setuju. Selebihnya yaitu sebesar 33,33% tidak setuju terhadap isue tersebut.

23. Dalam hal tidak setuju, alasan yang dikemukakan adalah bahwa sebagian kecil responden yaitu sebesar 20% menyebutkan karena masih ada budaya turun temurun yang beranggapan bahwa peran itu hanya dilakukan laki-laki. Selebihnya sebagian kecil (10 %) menyebutkan karena ketidaksiapan perempuan itu sendiri secara fisik maupun moral. Sebagian kecil lainnya (3,33%) menyebutkan karena ketidakrelaan pria posisinya diisi kaum perempuan .

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada umumnya perempuan berkarir dikalangan UPI memiliki persepsi yang positif tentang konsep kesetaraan gender. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis data, pada jawaban yang diberikan yang meskipun perolehan persentasenya bervariasi. Terhadap jawaban tentang adanya kesetaraan gender, kemudian pada jawaban kesetujuannya, perlunya perempuan diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam kegiatan pembangunan, serta kesetujuannya terhadap adanya penerapan pengarusutamaan gender dalam program pembangunan. memperlihatkan bahwa dikalangan perempuan berkarir di lingkungan UPI telah berwawasan gender. Tetapi walaupun demikian jawaban yang diperoleh masih belum menyeluruh. Masih. Dalam hal pengertian gender masih terdapat pemahaman yang beragam .

Demikian juga dalam hal apabila perempuan berkiprah dibidang politik, masih ada yang menyatakan tidak setuju, meskipun persentasenya kecil (23,33%) Dan kalau ditelusuri alasan ketidaksetujuan itu adalah bahwa hal ini akan banyak menyerap waktu untuk keluarga, dan percaya diri perempuan terlalu menonjol. Alasan yang disebutkan diatas menyimpulkan bahwa masih tampak anggapan bahwa perempuan harus sepenuhnya untuk keluarga

sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan-kegiatan diluar rumah, . Kondisi ini juga tidak terlepas dari pandangan streotype bahwa politik itu urusan laki-laki. Laki-laki ditempatkan pada wilayah politik dan publik dalam kehidupan sosial karenanya diidentifikasi dengan masyarakat dan publik, sedangkan perempuan tetap diasosiasikan dengan keluarga. Dengan demikian aspirasi perempuan yang memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender akan tidak muncul kepermukaan.

Mengenai kebijakan pengarusutamaan gender masih tampak pandangan yang bervariasi meskipun seluruh responden menyatakan setuju terhadap adanya penerapan pengarusutamaan gender.

Pada akhirnya dapat dikatakan bahwa pada umumnya secara konseptual mereka menyadari tentang konsep gender, kesetaraan gender ataupun pengarusutamaan gender tetapi pada kenyataannya persepsi mereka masih ada yang terpengaruh budaya dominasi laki-laki .

B. Saran-saran.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka disarankan sebagai berikut :

- Diperlukan suatu persamaan wawasan tentang konsep gender di setiap individu, baik perempuan maupun laki-laki, maka disarankan untuk lebih meningkatkan terhadap pemahaman mengenai konsep kesetaraan gender dengan mengadakan sosialisasi gender melalui penataran-penataran ataupun pelatihan-pelatihan di lingkungan UPI

- Menyelenggarakan pelatihan untuk menyebarluaskan pengarusutamaan gender pada lingkungan UPI
- Adanya studi lebih lanjut dengan sampel yang lebih besar mengenai konsep kesetaraan gender dan pengarusutamaan gender

DAFTAR PUSTAKA

Bemmelen. S.V. 1995, *Gender Dan Pembangunan : Apakah Yang Baru ?*, dalam Kajian Wanita dan Pembangunan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Darwis.R.S.(2002).*Pemahaman Gender Dalam Realita*. Bandung Pelatihan Kepemimpinan Pengurus Lembaga Perempuan.

Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, Sekretariat Negara, Jakarta.

Maulana Hasyim T(2006) *Kata dan Makna Pengarusutamaan gender*. Jurnal perempuan no.50. YJP.

Rentra, Perundangan Perempuan 2005-2009, Deputi Bidang Perlindungan Perempuan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI

Sentika.R.(2002) *Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan 2001 –2005*. Jakarta Kantor Meneg Pemberdayaan Perempuan

Santosa. P. (2002). *Teori Dan Konsep Gender*. Pelatihan Kepemimpinan Pengurus Lembaga Perempuan. Bandung Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah.

Silawati. H. (2006) *Pengarusutamaan Gender: Mulai Dari Mana ?*. Jurnal Perempuan.50. Jakarta. YJP.

Zoeraini D. Irwan. (2001) *Menuju Keadilan Dan Kesetaraan Gender*, Perspektif, Edisi I, Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia.

B A B I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam kebijakan dan strategi mengenai pembangunan dan pemberdayaan perempuan di Indonesia yang disusun pemerintah, dicantumkan tentang visi dan misi Pemberdayaan Perempuan . Visi pemberdayaan perempuan adalah terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara.

Untuk mewujudkan visi tersebut perlu dilaksanakan lima misi pemberdayaan perempuan yaitu 1) meningkatkan kualitas hidup perempuan , 2) meningkatkan kualitas kesetaraan dan keadilan gender, 3) penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan, 4) menegakkan Hak Azasi Manusia bagi perempuan , serta 5) meningkatkan kualitas dan kemandirian organisasi perempuan.

Dalam pelaksanaan program pembangunan pemberdayaan, telah pula ditetapkan strategi yang mencakup : 1) pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional sehingga dapat memberikan sumbangan terhadap terwujudnya kesetaraan dan keadilan jender 2) pengkajian dan perbaikan hukum dan peraturan perundangan yang bias gender, 3) advokasi pemberdayaan perempuan yang merupakan suatu proses untuk meyakinkan lembaga pemerintah, maupun non pemerintah tentang pentingnya kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara, serta menerapkannya dalam berbagai kegiatan pembangunan, 4) fasilitasi pemberdayaan perempuan , 5) pengembangan kemitrasejajaran yang harmonis antara perempuan dan laki-laki, hal ini diwujudkan guna mempercepat tercapainya kesetaraan dan keadilan jender, 6) pengembangan mekanisme monitoring yang merupakan strategi untuk melihat perkembangan pemberdayaan perempuan dari sisi kesetaraan dan keadilan gender dan 7) pengembangan sistem penghargaan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi yang benar tentang konsep kesetaraan dan keadilan gender merupakan pra syarat untuk dapat dilaksanakannya peningkatan partisipasi dan peran perempuan diberbagai bidang pembangunan. Diduga bahwa masyarakat saat ini kurang memiliki pemahaman yang memadai tentang konsep gender dan kesetaraan gender. Bertolak dari dugaan tersebut kiranya perlu diadakan suatu penelitian yang berkaitan dengan pemahaman konsep keadilan dan kesetaraan gender. Bilamana hal itu terbukti maka perlu dilakukan langkah-langkah sosialisasi tentang konsep gender, kesetaraan jender dan kebijakan pengarusutamaan gender.

C. PERUMUSAN MASALAH.

Upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dilakukan melalui kebijakan dalam rangka melaksanakan pengarusutamaan gender disemua bidang pembangunan melalui Inpres No. 9 tahun 2000. Ini berarti bahwa instruksi ini perlu diimplementasikan. Dengan demikian pemahaman mengenai konsep keadilan dan kesetaraan gender adalah merupakan prasyarat bagi pelaksanaan Inpres tersebut. Sementara disisi lain diduga masalah gender masih banyak belum dikenal dalam masyarakat. Berkaitan dengan kondisi ini maka peneliti dalam hal ini merumuskan masalah penelitian yang merupakan masalah pokok dalam penelitian ini yaitu : sejauh mana gambaran umum persepsi mahasiswa UPI tentang konsep gender, kesetaraan gender dan kebijaksanaan pengarusutamaan gender .

Secara lebih khusus masalah penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang merupakan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- c. Bagaimana gambaran umum pemahaman mahasiswa UPI secara keseluruhan mengenai konsep gender, kesetaraan gender serta kebijakan pengarusutamaan gender?
- d. Bagaimanakah gambaran umum pemahaman para mahasiswa dan mahasiswi UPI mengenai konsep gender, kesetaraan gender dan pengarusutamaan gender tersebut
- c. Apakah terdapat perbedaan pemahaman antara mahasiswa dan mahasiswi UPI mengenai konsep gender, kesetaraan gender serta pengarusutamaan gender

C. TUJUAN PENELITIAN

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi tentang konsep gender, kesetaraan gender dan pengarusutamaan gender pada mahasiswa UPI

Sedang secara khusus tujuan penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui gambaran umum mengenai pemahaman mahasiswa UPI secara keseluruhan tentang konsep gender, kesetaraan gender dan pengarusutamaan gender.
- c. Memperoleh gambaran umum mengenai pemahaman mahasiswa dan mahasiswi UPI tentang konsep gender, kesetaraan gender, dan pengarusutamaan gender pada mahasiswa perempuan UPI
- d. Memperoleh gambaran umum mengenai perbandingan pemahaman antara mahasiswa dan mahasiswi UPI mengenai konsep gender, kesetaraan gender dan pengarusutamaan gender.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para penentu kebijakan perlunya perhatian serius terhadap aplikasi pemahaman konsep gender, kesetaraan gender dan kebijakan pengarusutamaan gender. Dalam arti

memperhatikan kebutuhan praktis dan strategis kaum perempuan. Disamping itu juga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa untuk menyadari pentingnya memahami tentang konsep tentang gender, kesetaraan gender dan pengarusutamaan gender sebagai bekal apabila mereka telah terjun kekehidupan bermasyarakat. dalam upaya memecahkan masalah kesenjangan gender.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Persepsi

Istilah persepsi , banyak dikemukakan oleh para pakar, mereka memberi batasan-batasan mengenai istilah tersebut antara lain :

Sarlito Wirawan (1983 : 94) mengartikan persepsi sebagai a) suatu proses berfikir, b) proses pengambilan keputusan c) penafsiran terhadap obyek dan d) hasil dari stimulus.

Good, (1973 : 413) Persepsi dapat diartikan sebagai kesadaran individu akan obyek, kondisi atau hubungan-hubungan sebagai rangsangan sensoris

Setiap orang mempunyai persepsi, penafsiran tertentu, kesan tertentu terhadap obyek . Obyek yang sama dapat dilihat sebagai sesuatu yang berbeda-

beda, sebab kesan yang ditangkap oleh rangsangan pancaindra dapat berbeda-beda. Penyebab dari perbedaan tersebut dapat terjadi karena latar belakang, pengalaman, pengetahuan, perasaan, pendidikan dan nilai-nilai serta kebiasaan di lingkungan masing-masing.

Demikian pula gambaran yang sudah baku tentang wanita (stereotype), seolah-olah demikianlah adanya, tidak mudah untuk diubah. Hal ini merupakan pantulan dari anggapan yang sudah mengendap mungkin turun temurun berabad-abad, karenanya tak dipikirkan lagi dan diterima begitu saja, dipercaya dan diikuti. Sebagai contoh: wanita adalah makhluk yang lemah, lembut, manja. Wanita tidak mempunyai kemampuan untuk berprestasi baik dalam ilmu eksakta dll. Citra ini sudah terpatri dalam pikiran masyarakat, sukar merubahnya, walaupun pada kenyataannya kita dapat menunjuk adanya banyak yang pandai dalam ilmu eksakta.

Dalam masyarakat, kini anggapan-anggapan tersebut berkembang dan berubah terus menerus, tetapi perubahan tersebut biasanya berjalan lambat, membutuhkan suatu proses yang panjang, yang pada dasarnya adalah suatu proses belajar. Kedudukan dan peranan perempuan dalam pembangunan juga berkembang terus menerus, sehingga ketersediaan kaum wanita untuk belajar terus menerus, mengubah sikap dan tingkah lakunya dalam menjalankan peranannya dalam masyarakat juga berlangsung terus menerus.

Persepsi tentang peningkatan kedudukan dan peranan perempuan dalam pembangunan bangsa didasarkan pada pandangan bahwa perempuan adalah warganegara dan sumber daya insani pembangunan yang mempunyai kedudukan,

hak, kewajiban, tanggung jawab peranan dan kesempatan yang sama dengan laki laki dalam pembangunan di segala bidang termasuk kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kebijakan peningkatan kedudukan dan peranan perempuan pada hakekatnya diarahkan pada peningkatan kedudukan, peranan kemampuan, kemandirian serta ketahanan mental spiritual agar menjadi mitra sejajar pria yang selaras, serasi dan seimbang, sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dilihat dari sisi jumlah dan proporsi yang ada, posisi perempuan lebih besar dari laki-laki. Ini berarti bahwa perempuan dapat memberikan sumbangan yang sebanding dengan laki-laki apabila mempunyai kemampuan yang setara. Sementara dilain pihak perempuan diletakkan dalam posisi yang lebih rendah, yang mengakibatkan kemampuan untuk berperan dalam pembangunan menjadi lebih kecil. Pada hakekatnya perempuan dan laki-laki mempunyai kemampuan yang sama kecuali untuk fungsi reproduksinya. Sedangkan perbedaan yang ada disebabkan oleh stereotipe yang secara turun temurun terbentuk dalam tatanan sosial budaya masyarakat. Sejalan dengan perubahan jaman, stereotipe yang memarjinalkan perempuan dan meletakkan perempuan pada kedudukan yang lebih rendah, harus diubah karena tidak sesuai dengan kodrat manusia. Dalam upaya meningkatkan kondisi perempuan yang saat ini masih tertinggal, pemerintah telah menentukan kebijakan tentang kedudukan dan Pemberdayaan Perempuan dengan tujuan terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dalam setiap proses dan tahap pembangunan.

Strategi peningkatan peranan perempuan dalam perkembangannya selama ini lebih menekankan pada kerangka berfikir “wanita dalam pembangunan” (Women IN Development = WID), dan “Wanita dan Pembangunan” (Women And Development = WAD) yang lebih ditujukan pada masalah mengejar ketertinggalan wanita dibanding pria dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Penggunaan paradigma ini lebih banyak menghasilkan program / proyek khusus untuk wanita (Specific Womens Programmes / Project). Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa walaupun berdasarkan paradigma itu telah cukup banyak diperoleh berbagai kemajuan dalam peningkatan kedudukan dan peranan wanita dalam pembangunan, namun demikian upaya tersebut dirasakan masih perlu dilanjutkan dan lebih dikembangkan, serta dimantapkan dan dipercepat dengan menggunakan paradigma baru yaitu gender dan pembangunan “Gender And Development” = GAD, yang berupaya mendapatkan jalan untuk mengubah ketimpangan gender. Program GAD disetujui tahun 1990 hasil dari pertemuan di Vienna dengan strategi gender mainstreaming. GAD menekankan pentingnya perencanaan sensitif gender. Strategi yang terdapat pada GAD ialah bekerja ke arah terwujudnya keadilan berkenaan dengan dampak pembangunan. Suatu kerangka dasar konseptual baru yang memungkinkan identifikasi tujuan-tujuan dan penerapan program-program yang memenuhi harapan ini amat diperlukan. Pemikiran tersebut memunculkan ide untuk membawa wanita ke arus utama dan mengupayakan peningkatan kesadaran akan gender.

Masalah –masalah yang harus diatasi serta keterbatasan cara pendekatan GAD dalam setiap lingkungan nasional hendaknya disadari oleh para perencana dan pelaksana. Walaupun demikian menurut Sita van Bemmellen , (1995, hal. 178) GAD hanya mungkin berhasil jika bagian-bagian yang luas dari masyarakat, terutama pada badan-badan perencana dan badan-badan penentu kebijakan, maupun badan-badan pelaksana , jadi lebih sadar akan perbedaan-perbedaan dan ketimpangan-ketimpangan gender

Secara global disadari bahwa setiap kebijaksanaan dan strategi dalam pembangunan tidak selalu akan memiliki dampak, manfaat dan akibat yang sama terhadap laki-laki dan perempuan. Upaya untuk mewujudkan kondisi normatif dimana laki-laki dan perempuan mempunyai persamaan kedudukan, hak kewajiban, tanggung jawab dan peranan serta kesempatan dalam berbagai bidang kehidupan dan setiap kegiatan dalam pembangunan, tidak mungkin dapat diwujudkan apabila penanganannya hanya ditujukan terhadap perempuan saja tanpa memperhatikan masalah hubungan laki-laki dan perempuan.

B. Konsep Gender.

Kata gender dalam bahasa Indonesia dipinjam dari bahasa Inggris secara harfiah “ gender “ berarti jenis kelamin, sama halnya dengan seks yang juga jenis kelamin. Untuk memahami konsep gender harus dibedakan antara kata gender dengan seks. Seks mengacu pada pengertian perbedaan biologis jenis kelamin yang merupakan kodrat Tuhan karenanya bersifat permanen serta tidak dapat dipertukarkan.

Gender mengacu pada perbedaan jenis kelamin yang bukan bersifat biologis dan bukan kodrat Tuhan. Gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural.

Gender adalah perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya yang dapat diubah sesuai dengan kemajuan zaman. Gender adalah semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas lainnya. Gender menunjuk pada perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang “ society constructed”, jadi diciptakan oleh laki-laki dan perempuan itu sendiri melalui proses sosial budaya yang panjang.

Dalam masyarakat tampak adanya pembagian dua golongan yang membedakan laki-laki perempuan. Hal ini dapat dilihat dari ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk mengidentifikasi dua jenis kelamin tersebut. Sebagai contoh misalnya perempuan dikenal dengan yang berkaitan dengan, bunga, , bulan, lemah, emosional, alam Sedangkan laki-laki berkaitan dengan kumbang, matahari, kuat, rasional, budaya..

Dari dikhotomi tersebut tampak dua sifat yang berlawanan. Lambang yang diberikan pada laki-laki lebih dinamis dibandingkan dengan lambang lambang yang diberikan pada perempuan. Lambang yang dimiliki laki-laki menguasai lambang-lambang yang dimiliki perempuan. Johnson dalam Darwis (2002:3) mengemukakan bahwa nilai-nilai budaya menempatkan kelaki-lakian diatas keperempuanan dan menilai laki-laki dan perempuan dengan kriteria yang

berbeda. Identifikasi perempuan dengan alam menunjukkan kedekatannya dengan alam karena keterlibatannya dalam kegiatan reproduksi cenderung membatasi mereka pada fungsi-fungsi sosial tertentu seperti hubungan dengan anak. Pada akhirnya hubungan perempuan anak dan keluarga menempatkannya pada wilayah domestik. Laki-laki ditempatkan pada wilayah politik dan publik dari kehidupan sosial karenanya diidentifikasi dengan masyarakat dan publik, sedangkan perempuan tetap diasosiasikan dengan keluarga. Ciri dan sifat tersebut di atas sebenarnya tidak permanen dalam arti bisa dipertukarkan, sebagai contoh ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, sebaliknya ada perempuan yang rasional, kuat. Melalui dialektika konstruksi gender yang tersosialisasikan secara evolusional, lama-lama mempengaruhi biologis seks, sehingga kaum laki-laki kemudian terlatih dan tersosialisasi dan termotivasi untuk menjadi sifat gender yang ditentukan masyarakat, yaitu secara fisik lebih kuat dan agresif, sementara perempuan harus lemah lembut. Proses sosialisasi dan rekonstruksi ini berlangsung secara mapan dan lama, yang akhirnya sulit dibedakan apakah sifat gender ini dikonstruksikan oleh masyarakat atau kodrat biologis yang ditentukan Tuhan. Namun demikian sepanjang sifat-sifat yang melekat pada kedua seks ini bisa dipertukarkan, maka sifat tersebut adalah hasil konstruksi masyarakat dan bukanlah kodrat.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa gender adalah perbedaan hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan sebagai konstruksi yang bersumber pada nilai sosial budaya, pada berbagai golongan atau kelompok masyarakat, memiliki identitas yang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh faktor

ideologi, politik, ekonomi, sejarah, agama, budaya, adat istiadat dan etnk serta berubah ubah menurut waktu, tempat, lngkungan dan kemajuan

Nilai sosial budaya menentukan peranan stereotip, yaitu peranan yang dianggap cocok bagi laki-laki dan perempuan, sesuai dengan sifat-sifat biologis masing-masing didalam pembangunan termasuk kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sering menimbulkan kesenjangan hubungan lak-laki dan perempuan.

Adanya anggapan bahwa perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin serta tidak cocok menjadi kepala rumah tangga berakibatkan bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan, dan pekerjaan ini dinilai lebih rendah dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan lelaki dengan kategori pekerjaan bukan produktif sehingga tidak diperhitungkan dalam statistik ekonomi negara. Anggapan gender seperti itu membuat kaum perempuan sudah sejak dini disosialisasikan untuk menekuni peran gender mereka. Di lain pihak kaum lelaki tidak diwajibkan untuk menekuni berbagai jenis pekerjaan domestik. Bias gender inilah yang memperkuat pelanggaran secara kultural dan struktural beban kerja kaum perempuan.

“Bias” yang dalam bahasa Inggris diartikan sebagai “prasangka” yaitu pendapat atau anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui/ menyaksikan / menyelidiki sendiri. Secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti yang menyimpang.

Bias gender adalah cara pandang (idea) seorang perempuan terhadap laki-laki sesuai dengan anggapannya yang menyimpang, demikian juga sebaliknya.

Prasangka itu sendiri mengandung arti terdapat hal yang tidak obyektif, jadi terdapat persepsi yang tidak obyektif pada diri perempuan maupun laki-laki terhadap lawan jenisnya.

Bias gender telah diyakini kebenarannya oleh laki-laki maupun perempuan dan diterima sebagai kodrat Tuhan yang tidak dapat diubah sehingga menjadi pedoman dalam bertingkah laku dalam keluarga maupun masyarakat yang lebih luas.

Perbedaan gender tidak menjadi masalah selama tidak melahirkan ketidakadilan gender (gender inequalities).Namun ternyata perbedaan gender seringkali melahirkan ketidakadilan baik bagi laki-laki maupun perempuan Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.

Ketidakadilan Gender adalah bahwa :

- :1) Perlakuan tidak adil yang diberikan baik kepada laki-laki maupun perempuan.
- 2) Dalam banyak kasus perlakuan tidak adil banyak menimpa perempuan yang dialaminya baik di rumah, di tempat bekerja maupun di masyarakat.
- 3) Ketidakadilan gender tercipta karena : a) hubungan gender yang timpang b) diskriminasi gender. Dikonstruksikan oleh budaya dan melembaga / dilembagakan.
- 5) Apabila proses ketidakadilan gender terus berlanjut, kesetaraan gender tidak tercapai.

Manifestasi ketidakadilan gender menurut beberapa pakar (Zoerani 2001: 2) timbul dalam bentuk :

- 7) Kekerasan (violence)
- 8) Marginalisasi. Perempuan
- 9) Subordinasi
- 10) Pembentukan stereotip atau pelabelan negatif
- 11) Beban kerja lebih panjang dan lebih banyak
- 12) Peran ganda

C. Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender adalah kesetaraan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut

Jadi kesetaraan gender adalah menerima dan menilai secara setara :

- 7) perbedaan antara laki-laki dan perempuan
- 8) perbedaan peran yang dipegang oleh laki-laki dan perempuan dalam masyarakat
- 9) memahami bahwa kondisi hidup laki-laki dan perempuan pada dasarnya karena fungsi melahirkan pada perempuan.
- 10) Menerima perbedaan laki-laki dan perempuan sebagai hikmah
- 11) Kesetaraan gender tidak sinonim dengan persamaan

12) Kesetaraan gender berarti sederajat dalam keberadaan, sederajat dalam keberdayaan dan keikutsertaan disemua bidang kehidupan domestik dan publik

D. Pengarusutamaan gender, (PUG), gender mainstreaming.

Pengarusutamaan gender yang saat ini menjadi garis kebijakan yang ditegaskan melalui INPRES No. 9 tahun 2000. Dalam Inpres tersebut dinyatakan bahwa pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.

Tujuan pengarusutamaan gender ini adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pengarusutamaan gender telah diadopsi secara resmi di Indonesia sejak tahun 2000 dengan keluarnya Instruksi Presiden atau Inpres No.9 Tahun 2000. Kemunculan dasar hukum ini merupakan satu bentuk komitmen pemerintah Indonesia untuk mengikuti kesepakatan Internasional, serta desakan masyarakat sipil agar pemerintah melakukan tindakan-tindakan konkrit dan sistematis dalam mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender

Konsep PUG pertama kali muncul saat Konferensi PBB untuk Perempuan IV di Beijing tahun 1995. PUG terjemahan dari bahasa Inggris gender mainstreaming, Menurut definisi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB gender mainstreaming adalah strategi agar kebutuhan dan pengalaman perempuan dan laki-laki menjadi bagian tak terpisahkan dari desain, Implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan dan program dalam seluruh lingkup politik, ekonomi, dan sosial sehingga perempuan dan laki-laki sama-sama mendapatkan keuntungan, dan ketidakadilan tak ada lagi. Titik tolak utama dalam PUG adalah analisa yang menyeluruh terhadap situasi pembangunan. Menurut Hartian Silawati (2006: 21) ada tiga prinsip utama dibelakang PUG yaitu :

- a. Menumbuhkan individu sebagai manusia seutuhnya, prinsip ini berasal dari paradigma politics of difference (politik perbedaan) yang melihat laki-laki dan perempuan sebagai orang yang mampu memikul tanggung jawab masing-masing. Kemanusiaan laki-laki dan perempuan harus mendapatkan penghargaan dan penghormatan yang sama kerana mereka sama-sama lahir sebagai manusia, yang berhak untuk hidup dengan mulia. Hal ini sesuai dengan prinsip Hak Azasi Manusia yang menganggap laki-laki dan perempuan sebagai manusia yang sama sama memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi.
- e. Demokrasi. Perlu diselenggarakan forum-forum dimana perempuan dan laki-laki dapat menyuarakan kebutuhan dan aspirasinya . Merekalah yang bisa memastikan agar sumber daya dialokasikan berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan.
- f. Fairness, justice, dan equity.

Inti dari prinsip fairness, justice dan equity (pemerataan, penegakan hukum dan kesetaraan) ini adalah yang disebut keadilan sosial. Inilah alasan utama mengapa PUG harus dilakukan. Prinsip ini mengakui adanya ketidakadilan sosial dalam pengalokasian sumber daya, yang akan memudahkan kita melakukan langkah-langkah untuk menghilangkannya.

Dari tiga prinsip diatas, jelas bahwa keadilan gender adalah nilai fundamental dalam pemenuhan dan promosi hak-hak asasi manusia. Mengarusutamakan keadilan gender berarti membawa laki-laki dan perempuan ke dalam proses pengambilan keputusan tentang alokasi sumber daya dan manfaat pembangunan.

Menurut Hasyim Maulana.T (2006:52) manfaat PUG adalah :

- e. Pemerintah dapat bekerja lebih efisien dan efektif dalam menerbitkan kebijakan-kebijakan publik yang adil dan responsif gender, perempuan dan laki-laki.
- f. Kebijakan dan pelayanan publik serta program dan perundangan-undangan yang adil dan responsif gender akan membuahkan manfaat yang adil bagi semua rakyat perempuan dan laki-laki.
- g. PUG merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama dimasyarakat.
- h. PUG mengantar kepada pencapaian kesetaraan gender dan karenanya PUG meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah.

- i. Keberhasilan pelaksanaan PUG memperkuat kehidupan sosial politik dan ekonomi suatu bangsa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Sesuai dengan permasalahan serta tujuan yang dikemukakan dalam penelitian ini yaitu untuk memperoleh gambaran umum mengenai persepsi mahasiswa tentang gender, kesetaraan gender serta pengarusutamaan gender, jadi dimaksudkan untuk memperoleh gambaran kondisi sekarang maka metode yang digunakan adalah metode deskriptif, dengan pendekatan kuantitatif.

B. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Teknik pengumpulan data tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa kuesioner merupakan alat yang efisien dan efektif dalam menjaring data yang obyektif.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa UPI Bandung. Dalam menetapkan sampel dengan mempertimbangkan tersedianya waktu dan dana maka peneliti dalam kesempatan ini menentukan sampel secara acak sebanyak empat fakultas yaitu: FIP, FPBS, FPMIPA dan FPTK, yang dianggap dapat mewakili dari enam fakultas yang ada. Dari tiap fakultas yang dijadikan sampel tersebut, ditentukan satu jurusan yang mewakili, dan terambil jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Pendidikan Seni Rupa, Pendidikan Biologi, dan jurusan Pendidikan Teknik Mesin. Dari tiap jurusan diwakili oleh responden dari mahasiswa semester lima, yaitu dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah berjumlah 39 orang, dari jurusan Pendidikan Seni Rupa berjumlah 44 orang, dari jurusan Pendidikan Biologi berjumlah 59 orang serta dari jurusan Pendidikan Teknik Mesin berjumlah 19 orang, sehingga jumlah sampel seluruhnya adalah 161 orang. Setelah dipilah-pilah antara perempuan dan laki-laki, diperoleh jumlah perempuan sebanyak 102 orang dan laki-laki sebanyak 59 orang.

D. Pengolahan data

Pengolahan data dianalisis secara kuantitatif dengan perhitungan persentase melalui tahapan : tabulasi, penafsiran data kuantitatif dan pembahasan. Dalam mentabulasi data yang terkumpul sesuai dengan tujuan penelitian, data kolektif tersebut ditabulasi secara keseluruhan dan kemudian dianalisis secara keseluruhan dan secara terpilah-pilah menurut jenis kelamin perempuan dan laki-laki.

Hasil analisis ditampilkan dalam bentuk tabel-tabel distribusi frekuensi. Penafsiran data dalam penelitian ini berpedoman pada batasan persentase yang diperoleh dari hasil lokakarya jurusan Adpen FIP , IKIP yang dikutip oleh Supriadi (1994 : 74)

100 %	= Seluruhnya
76 % - 99 %	= Sebagian besar
51 % - 75 %	= Lebih dari setengahnya
50 %	= Setengahnya
26 % - 49 %	= Kurang dari setengahnya
1 % - 25 %	= Sebagian kecil
0 %	= Tidak seorangpun

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis data.

Dari hasil analisis data yang diberikan responden melalui angket, diperoleh sejumlah jawaban mengenai topik-topik permasalahan yang diolah melalui tahapan : tabulasi, penafsiran data yang kemudian dikaji. Hasil analisis dijadikan dasar dalam menyusun temuan penelitian ini , yang kemudian ditarik kesimpulan penelitian serta rekomendasi sehubungan dengan kesimpulan tersebut.

Data yang diperoleh melalui angket ini adalah mengenai persepsi mahasiswa UPI mengenai konsep Gender, kesetaraan gender serta pengarusutamaan gender. .

1. Mengenai sering tidaknya membaca buku yang berkaitan dengan gender dari hasil analisis data dapat dikemukakan bahwa 65,84 % mahasiswa UPI jarang membaca buku-buku mengenai gender, 29,19 % tidak pernah dan 4,97 % sering.

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa jarang membaca buku mengenai gender, Kurang dari setengahnya tidak pernah, hanya sebagian kecil yang sering membaca buku.. Apabila dipilah antara mahasiswa perempuan dan laki-laki dapat dikemukakan bahwa baik perempuan maupun laki-laki ternyata lebih dari setengahnya jarang membaca buku mengenai gender

2. Pandangan mengenai pengertian gender bagi mahasiswa. Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa 49,07 % responden menyatakan bahwa gender adalah perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang ditentukan oleh nilai-nilai sosial budaya yang bisa berubah atau diubah. Kemudian sebesar 34,16 % responden menyatakan bahwa gender adalah jenis kelamin. Dan sebagian kecil yaitu 16,77 % responden menyatakan bahwa gender adalah kebebasan perempuan untuk berkiprah dalam berbagai aspek kegiatan masyarakat.

Dari temuan di atas dapat dikatakan bahwa pandangan mengenai pengertian gender bervariasi tetapi hampir setengahnya responden memberi pernyataan mengenai pengertian gender adalah bahwa gender adalah perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang ditentukan oleh nilai-nilai sosial budaya yang bisa berubah atau diubah.

Apabila dipilah antara perempuan dan laki-laki ternyata baik responden perempuan maupun laki-laki paling banyak juga menyebutkan bahwa pengertian gender adalah perbedaan laki-laki dan perempuan yang ditentukan oleh nilai-nilai sosial budaya..

3. Mengenai pandangan kesetaraan gender, dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa pandangan responden juga bervariasi. Secara keseluruhan hampir setengah responden yaitu 47,83 % menyatakan bahwa kesetaraan gender adalah persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Dan hampir setengahnya pula yaitu 37,89% responden menyatakan bahwa kesetaraan gender adalah kemitrasejajaran antara perempuan dan laki-laki dan selebihnya, 14,28 % responden menyatakan bahwa kesetaraan gender adalah tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki –laki disegala bidang.

Dari hasil temuan diatas ternyata paling banyak responden memberi pandangannya bahwa kesetaraan gender adalah persamaan hak antara perempuan dan laki-laki. Dan apabila dipilah antara laki-laki dan perempuan ternyata juga baik responden perempuan maupun laki-laki paling banyak memberi pengertian kesetaraan gender adalah persamaan hak antara perempuan dan laki-laki..

4. Mengenai pandangan ketidaksetaraan gender bagi responden, dari data yang terkumpul ternyata sebagian besar responden yaitu 67,70 % menyatakan bahwa pandangan ketidaksetaraan gender adalah ketidakberdayaan perempuan dalam bersikap dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian hampir setengah dari responden yaitu 26,71% menyatakan bahwa ketidak setaraan gender adalah persepsi menang kalah antara perempuan dan laki-laki dan selebihnya yaitu 5,59 %i menyatakan

sikap acuh tak acuh perempuan terhadap keberadaan dirinya. Dari temuan diatas dapat dikemukakan bahwa secara keseluruhan pandangan sebagian besar responden mengenai ketidaksetaraan gender adalah ketidakberdayaan perempuan dalam bersikap dibandingkan dengan laki-laki. Apabila dipilah antara perempuan dan laki-laki ternyata baik bagi responden perempuan maupun bagi responden laki-laki lebih dari setengahnya memberi pandangan yang sama terhadap ketidaksetaraan gender yaitu ketidakberdayaan perempuan dalam bersikap, dibandingkan dengan laki-laki..

5. Terhadap pandangan setuju atau tidak setuju terhadap konsep kesetaraan gender ternyata secara keseluruhan sebagian besar yaitu 79,50 % responden menyatakan setuju dengan adanya konsep kesetaraan gender. Selebihnya yaitu sebesar 20,50 % tidak setuju.. Dari temuan diatas dapat diperoleh gambaran bahwa kebanyakan responden setuju terhadap adanya konsep kesetaraan gender. Dan kalau dipilah antara perempuan dan laki-laki ternyata baik perempuan maupun laki-laki sebagian besar juga setuju terhadap adanya konsep kesetaraan gender .

6. Alasan setuju terhadap adanya konsep gender, dari hasil pengolahan data ternyata 50% responden memberi alasan karena ada perasaan saling menunjang di segala bidang antara perempuan dan laki-laki. Selebihnya, 39,84 % responden memberi alasan karena menyadari kewajiban masing-masing. Dan 10,16 % memberi alasan karena saling menghargai antara perempuan dan laki-laki.

Dari temuan diatas diperoleh gambaran bahwa alasan setuju terhadap kesetaraan gender adalah karena dengan adanya kesetaraan gender ada perasaan saling

menunjang di segala bidang antara perempuan dan laki-laki. Dan apabila dibandingkan antara responden perempuan dan laki-laki ternyata baik bagi responden perempuan maupun bagi responden laki-laki paling banyak memberi alasan yang sama juga yaitu karena adanya saling menunjang disegala bidang.

7. Sementara alasan yang dikemukakan atas ketidaksetujuan responden terhadap kesetaraan gender ternyata dari hasil pengolahan data diperoleh jawaban yang bervariasi, bahwa dari seluruh jumlah responden yang tidak setuju ternyata 36,36% responden memberi alasan karena perempuan akan merasa tidak risi lagi menghadapi laki-laki. Kemudian 33,34 % memberi alasan tidak usah dipermasalahkan, serta 33,30 % menyebutkan alasannya karena pria akan merasa berkurang kewibawaannya.

Dari hasil temuan diatas dapat dikatakan bahwa ternyata jawaban responden bervariasi terhadap alasan ketidaksetujuannya terhadap adanya konsep kesetaraan gender yaitu bahwa ketidak setujuan tersebut disebabkan karena perempuan akan merasa tidak risi lagi menghadapi laki-laki, pria merasa berkurang kewibawaannya, serta tidak perlu dipermasalahkan.

Alasan yang paling banyak dikemukakan adalah karena perempuan akan merasa tidak risi lagi menghadapi laki-laki. Apabila dibandingkan antara responden perempuan dan laki-laki terhadap ketidaksetujuan ini ternyata bagi responden perempuan paling banyak memberi alasan bahwa pria akan merasa berkurang kewibawaannya sementara alasan yang dikemukakan responden laki-laki paling banyak adalah perempuan akan merasa tidak risi lagi menghadapi laki-laki.

8. Pendapat mengenai setuju tidaknya apabila perempuan banyak berkiprah

di bidang politik. Ternyata dari hasil pengolahan data sebagian besar responden (60,25%) menyatakan setuju apabila perempuan banyak berkiprah di bidang politik dan selebihnya 39,75 % tidak setuju. Apabila dipilah antara responden perempuan dan laki-laki ternyata bagi responden perempuan sebagian besar (72,55%) menyatakan kesetujuannya apabila perempuan banyak berkiprah di bidang politik.. Sementara bagi responden laki-laki ternyata paling banyak (61.02%) memberi jawaban tidak setuju apabila perempuan banyak berkiprah di bidang politik.

9. Alasan setuju apabila perempuan banyak berkiprah di bidang politik, ternyata secara keseluruhan 61.86% responden memberi alasan karena adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan , selebihnya yaitu 34,02 % memberi alasan karena tidak akan ada dominasi antara perempuan dan laki-laki, serta 4,12 % memberi alasan karena perempuan merasa percaya diri.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan, sebagian besar mahasiswa UPI yang setuju apabila perempuan berkiprah dibidang politik memberi alasan atas kesetujuannya karena adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Sementara apabila dipilah antara laki-laki dan perempuan ternyata baik perempuan maupun laki-laki paling banyak memberi alasan yang sama yaitu karena adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

10. Sementara bagi yang tidak setuju apabila perempuan berkiprah di bidang politik dari hasil pengolahan data ternyata alasan yang diberikan adalah karena banyak menyerap waktu untuk keluarga (68,75%).. Kemudian 17,19 % responden

memberi alasan karena percaya diri perempuan terlalu menonjol dan selebihnya 14,06 % memberi alasan karena melelahkan fisik dan mental.

Dari uraian diatas dapat dikemukakan bahwa dari jumlah responden yang tidak setuju apabila perempuan banyak berkiprah dibidang politik paling banyak responden memberi alasan ketidaksetujuannya adalah karena banyak menyerap waktu keluarga. Sementara apabila dipilah antara laki-laki dan perempuan , baik responden perempuan maupun responden laki-laki yang tidak setuju paling banyak memberi alasannya karena banyak menyerap waktu untuk keluarga.

11. Pendapat responden kalau istri lebih besar penghasilannya

Dari hasil pengolahan data ternyata 44.72% responden menyatakan tetap berharap suami lebih besar penghasilannya. Kemudian 40,99% menyatakan salut dan bangga, serta selebihnya 14.29% menyatakan istri suka sombong.

Dari temuan diatas dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan hampir setengah dari responden menyatakan tetap berharap suami lebih besar penghasilannya daripada istri. Apabila dipilah antara perempuan dan laki-laki ternyata lebih dari setengah responden perempuan (52.94%) tetap berharap suami lebih besar penghasilannya , sementara bagi responden laki-laki paling banyak menyatakan salut dan bangga.

12. Pendapat responden dalam hal apabila perempuan menjadi pejabat pada suatu instansi .

Dari hasil pengolahan data ternyata 63.35% responden menyatakan salut dan bangga, kemudian 33,54% menyatakan biasa-biasa saja, serta selebihnya yaitu 3.11% menyatakan risi dan kaku. Dari temuan diatas dapat dikatakan bahwa jawaban responden bervariasi. Yang paling banyak adalah

menyatakan salut dan bangga apabila perempuan menjadi pejabat pada suatu instansi. Dan apabila dipilah antara perempuan dan laki-laki ternyata sebagian responden perempuan menyatakan salut dan bangga, demikian juga bagi responden laki-laki.

13. Pendapat responden apabila dalam suatu keluarga istri lebih tinggi kedudukan sosialnya dari suami.

Dari hasil pengolahan data yang terkumpul ternyata 92,55% responden menyatakan bahwa suami tetap dominan sebagai kepala keluarga, selebihnya yaitu 6,83% menyatakan bahwa istri lebih dominan dari suami dan sebesar 0,62% menyatakan semua keputusan mengenai masalah keluarga ditentukan oleh istri.

Dari temuan diatas dapat dikatakan bahwa hampir seluruh responden menyatakan bahwa apabila dalam satu keluarga istri lebih tinggi kedudukan sosialnya akan tetap berharap suami tetap dominan sebagai kepala keluarga. Dan apabila dipilah antara perempuan dan laki-laki ternyata juga baik responden perempuan maupun laki-laki sebagian besar menyatakan suami tetap lebih dominan sebagai kepala keluarga..

14. Dalam hal perlu tidaknya perempuan diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam kegiatan pembangunan. Dari hasil pengolahan data yang terkumpul ternyata 92,55% responden menyatakan bahwa hal tersebut diperlukan. Sementara selebihnya yaitu sebesar 7,45% menyatakan bahwa pemberian kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki tidak diperlukan. Dari hasil temuan diatas diperoleh gambaran bahwa sebagian besar responden menyatakan perempuan perlu diberi kesempatan yang sama dengan

laki-laki dalam kegiatan pembangunan. Apabila dipilah ternyata baik responden perempuan maupun laki-laki sebagian besar juga menyatakan bahwa perempuan perlu diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam kegiatan pembangunan.

15. Alasan responden apabila perempuan perlu diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam kegiatan pembangunan. Dari hasil pengolahan data ternyata 51,68% responden memberikan alasan bahwa hal tersebut diperlukan karena perempuan sama haknya dengan laki-laki. Selebihnya yaitu sebesar 27,51% menyebutkan alasannya ialah bahwa persoalan pemberdayaan perempuan pada masyarakat Indonesia telah menjadi doktrin negara. Dan sebagian kecil lainnya yaitu sebesar 20,81 menyebutkan alasannya bahwa perempuan merupakan bagian terbesar dari penduduk Indonesia sehingga perlu diberikan kesempatan yang sama dalam kegiatan pembangunan.

Dari temuan diatas dapat dikatakan paling banyak responden memberi alasan apabila perempuan perlu diberikan kesempatan yang sama dalam kegiatan pembangunan, adalah karena perempuan sama haknya dengan laki-laki . Dan kalau dipilah antara laki-laki dan perempuan ternyata baik perempuan maupun laki-laki paling banyak juga memberi alasan adalah karena perempuan sama haknya dengan laki-laki.

16. Sementara terhadap alasan responden apabila perempuan tidak perlu diberikan kesempatan yang sama dalam kegiatan pembangunan, berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh gambaran bahwa 50% dari jumlah responden yang tidak setuju (12 orang) memberikan alasan karena kurangnya kebijakan -

kebijakan publik yang nyata. 33.33% memberikan alasan yaitu karena terikat waktu. Dan selebihnya sebesar 16,67% menyebutkan alasannya adalah karena kemampuan perempuan terbatas. Apabila dipilah antara laki dan perempuan ternyata baik perempuan maupun laki-laki paling banyak memberikan alasan yang sama terhadap ketidaksetujuannya apabila perempuan diberikan kesempatan yang sama dalam kegiatan pembangunan yaitu Dari temuan diatas dapat dikatakan alasan yang dikemukakan bahwa perempuan tidak perlu diberikan kesempatan yang sama dalam kegiatan pembangunan adalah karena kurangnya kebijakan – kebijakan publik yang nyata, terikat waktu dan kemampuan perempuan terbatas. Yang paling banyak adalah kurangnya kebijakan-kebijakan publik. . Apabila dipilah antara laki dan perempuan ternyata baik perempuan maupun laki-laki paling banyak memberikan alasan yang sama terhadap ketidaksetujuannya apabila perempuan diberikan kesempatan yang sama dalam kegiatan pembangunan yaitu karena kurangnya kebijakan –kebijakan publik yang nyata.

17. Pendapat responden tentang kebijakan pengarusutamaan gender . Dari hasil pengolahan data diperoleh hasil bahwa 70.81% menyebutkan bahwa pengarusutamaan gender adalah menetapkan langkah-langkah strategis dalam upaya untuk lebih meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan. Selebihnya sebagian kecil responden yaitu 12,42% menyebutkan bahwa kebijakan pengarusutamaan gender adalah meningkatkan sikap yang penuh inisiatif kaum perempuan. Dan sebagian kecil lainnya yaitu sebesar 10.56% menyebutkan pengarusutamaan gender adalah meningkatkan fisik dan intelektual kaum perempuan. Serta sebanyak 6.21% responden tidak menjawab. Dari uraian

diatas dapat dikemukakan bahwa sebagian besar responden menyebutkan bahwa pengarusutamaan gender adalah menetapkan langkah-langkah strategis dalam upaya untuk lebih meningkatkan pemberdayaan perempuan dan laki-laki Apabila dipilah antara laki-laki dan perempuan

18. .Dalam hal setuju tidaknya responden terhadap adanya penerapan pengarusutamaan gender apabila responden telah bekerja . Dari hasil pengolahan data ternyata sebagian besar responden yaitu 68.32% setuju terhadap adanya penerapan pengarusutamaan gender apabila responden telah bekerja. Sementara yang tidak setuju terhadap penerapan pengarusutamaan gender adalah sebesar 26.09% Apabila dipilah antara laki-laki dan perempuan ternyata baik perempuan maupun laki-laki lebih dari setengahnya menjawab setuju terhadap adanya penerapan pengarusutamaan gender.

19. Dalam hal apabila responden sudah bekerja dan memperoleh kedudukan yang tinggi apakah responden setuju terhadap pemberian peran yang signifikan kepada perempuan. Dari hasil pengolahan data diperoleh gambaran bahwa sebagian besar responden yaitu 63.98% setuju , karena sesuai dengan doktrin negara. Selebihnya yaitu sebesar 23,60% tidak setuju karena sesuai dengan kebijakan publik yang nyata. Serta sebesar 12,42% responden tidak menjawab. Dan apabila dipilah antara perempuan dan laki-laki ternyata baik perempuan maupun laki-laki paling banyak menyatakan akan memberi peran yang signifikan kepada perempuan apabila sudah bekerja dan memperoleh jabatan yang tinggi.

20. Mengenai pendapat responden tentang isue perempuan yang menuntut 30% posisi jabatan di instansi tempat bekerja. Dari hasil pengolahan data ternyata

sebagian besar responden yaitu sebesar 67,08% setuju. Selebihnya yaitu sebesar 29.81% tidak setuju terhadap isue tersebut. Sementara yang tidak menjawab sebesar 3.11%. Dan apabila dipilah antara laki-laki dan perempuan ternyata baik laki-laki maupun perempuan paling banyak setuju tentang isu tersebut.

21. .Dalam hal mengenai pendapat responden tentang apabila sesudah adanya kesetaraan gender dan kebijakan pengarusutamaan gender maka persentase perempuan menduduki jabatan ada perubahan, ternyata sebagian besar responden yaitu 73,29% setuju. Kemudian responden yang tidak setuju yaitu sebesar 22.36% Sedang selebihnya yaitu 4.35% responden tidak memberi jawaban. Dan apabila dipilah antara perempuan dan laki-laki ternyata baik perempuan maupun laki-laki lebih dari setengahnya menyatakan setuju

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada umumnya mahasiswa UPI baik laki-laki maupun perempuan cukup memahami tentang konsep gender, kesetaraan gender serta pengarusutamaan gender. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis data, pada jawaban yang diberikan yang meskipun perolehan persentasenya bervariasi antara perempuan dan laki-laki. Terhadap jawaban tentang adanya kesetaran gender, kemudian pada jawaban kesetujuannya apabila perempuan berkiprah dibidang

politik, perlunya perempuan diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam kegiatan pembangunan, serta kesetujuannya terhadap adanya penerapan pengarusutamaan gender dalam program pembangunan. memperlihatkan bahwa mahasiswa telah berwawasan gender. Tetapi walaupun demikian tidak seluruhnya mahasiswa UPI sudah berwawasan gender masih ada diantara perempuan dan laki-laki belum memahami mengenai konsep gender, kesetaraan gender serta pengarusutamaan gender. Dalam hal pengertian gender masih terdapat pendapat yang bervariasi, hal ini menandakan masih adanya pemahaman yang beragam tentang konsep gender. Dalam hal setuju tidaknya terhadap adanya konsep kesetaraan gender, masih ada yang masih menyebutkan tidak setuju meskipun jumlahnya sedikit yaitu 20,50 % dan kalau diselusuri dari jumlah tersebut laki-laki lebih besar persentasenya (37.29%) dibanding perempuan (10.78%).Dan ketidaksetujuan ini disebabkan paling banyak laki-laki menyebutkan karena perempuan akan merasa tidak risi lagi menghadapi laki-laki. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa masih terdapat budaya patriarkhi, yang menganggap perempuan harus merasa risi menghadapi laki-laki, pria harus lebih berwibawa, dibanding perempuan, dimana hal tersebut tidak seharusnya terjadi apabila telah memahami konsep gender.

Demikian juga dalam hal apabila perempuan berkiprah dibidang politik, masih ada yang menyatakan tidak setuju (39.75%) Dan kalau dipilah antara laki-laki dan perempuan ternyata lebih dari setengahnya laki-laki menyatakan tidak setuju. Alasan ketidaksetujuan itu adalah bahwa hal ini akan banyak

menyerap waktu untuk keluarga. Alasan yang disebutkan diatas menyimpulkan bahwa masih tampak anggapan bahwa perempuan harus sepenuhnya untuk keluarga sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan-kegiatan diluar rumah, . Kondisi ini juga tidak terlepas dari pandangan streatipe bahwa politik itu urusan laki-laki. Laki-laki ditempatkan pada wilayah politik dan publik dalam kehidupan sosial karenanya diidentifikasi dengan masyarakat dan publik, sedangkan perempuan tetap diasosiasikan dengan keluarga. Dengan demikian aspirasi perempuan yang memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender akan tidak muncul kepermukaan.

Mengenai kebijakan pengarusutamaan gender lebih dari setengah responden (68.32%) menyatakan setuju terhadap adanya penerapan pengarusutamaan gender, dan kurang dari setengahnya (26.09%) tidak setuju serta 5,59% tidak menjawab. Dan apabila diselusuri ternyata persentase yang tidak setuju kebanyakan laki-laki dibanding perempuan. Melihat kondisi diatas dapat dikatakan bahwa belum semua responden menyetujui terhadap adanya penerapan pengarusutamaan gender.

Pada akhirnya dapat dikatakan bahwa pada umumnya secara konseptual mereka menyadari tentang konsep gender, kesetaraan gender ataupun pengarusutamaan gender tetapi pada kenyataannya persepsi mereka masih terpengaruh budaya dominasi laki-laki .

B. Saran-saran.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka disarankan sebagai berikut :

- Sehubungan dengan cukup memadainya pemahaman mengenai tentang konsep gender, kesetaraan gender serta pengarusutamaan gender maka disarankan untuk mengadakan sosialisasi gender bagi mahasiswa melalui penataran-penataran ataupun pelatihan-pelatihan mengenai gender.
- Sosialisasi gender ini dapat juga diadakan melalui kegiatan belajar mengajar, dimana dalam proses belajar mengajar kepada pengajar disarankan untuk memasukkan konsep gender, kesetaraan gender dan pengarusutamaan gender, sehingga meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan.
- Mengadakan mata kuliah kajian wanita dalam kurikulum.
- Diadakan penelitian lagi dalam sampel yang lebih besar, dengan obyek yang lain

DAFTAR PUSTAKA

Bemmelen. S.V. 1995, *Gender Dan Pembangunan : Apakah Yang Baru ?*, dalam Kajian Wanita dan Pembangunan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Darwis.R.S.(2002).*Pemahaman Gender Dalam Realita*. Bandung Pelatihan Kepemimpinan Pengurus Lembaga Perempuan.

Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, Sekretariat Negara, Jakarta.

Maulana Hasyim T(2006) *Kata dan Makna Pengarusutamaan gender*. Jurnal perempuan no.50. YJP.

Sentika.R.(2002) *Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan 2001 –2005*. Jakarta Kantor Meneg Pemberdayaan Perempuan

Santosa. P. (2002). *Teori Dan Konsep Gender*. Pelatihan Kepemimpinan Pengurus Lembaga Perempuan. Bandung Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah.

Silawati. H. (2006) *Pengarusutamaan Gender: Mulai Dari Mana ?*. Jurnal Perempuan.50. Jakarta. YJP.

Zoeraini D. Irwan. (2001) *Menuju Keadilan Dan Kesetaraan Gender*, Perspektif, Edisi II/ 2001.

LAPORAN PENELITIAN

**PERSEPSI MAHASISWA UPI TENTANG KONSEP GENDER,
KESETARAAN GENDER DAN PENGARUSUTAMAAN
GENDER**

Oleh

Dra. Sofi Sufiarti

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Dalam kebijakan dan strategi mengenai pembangunan dan pemberdayaan perempuan di Indonesia yang disusun pemerintah, dicantumkan tentang visi dan misi Pemberdayaan Perempuan . Visi pemberdayaan perempuan adalah terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara.

Untuk mewujudkan visi tersebut perlu dilaksanakan lima misi pemberdayaan perempuan yaitu 1) meningkatkan kualitas hidup perempuan , 2) meningkatkan kualitas kesetaraan dan keadilan gender, 3) penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan, 4) menegakkan Hak Azasi Manusia bagi perempuan , serta 5) meningkatkan kualitas dan kemandirian organisasi perempuan.

Dalam pelaksanaan program pembangunan pemberdayaan, telah pula ditetapkan strategi yang mencakup : 1) pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional sehingga dapat memberikan sumbangan terhadap terwujudnya kesetaraan dan keadilan jender 2) pengkajian dan perbaikan hukum

dan peraturan perundangan yang bias gender, 3) advokasi pemberdayaan perempuan yang merupakan suatu proses untuk meyakinkan lembaga pemerintah, maupun non pemerintah tentang pentingnya kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara, serta menerapkannya dalam berbagai kegiatan pembangunan, 4) fasilitasi pemberdayaan perempuan, 5) pengembangan kemitrasejajaran yang harmonis antara perempuan dan laki-laki, hal ini diwujudkan guna mempercepat tercapainya kesetaraan dan keadilan gender, 6) pengembangan mekanisme monitoring yang merupakan strategi untuk melihat perkembangan pemberdayaan perempuan dari sisi kesetaraan dan keadilan gender dan 7) pengembangan sistem penghargaan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi yang benar tentang konsep kesetaraan dan keadilan gender merupakan pra syarat untuk dapat dilaksanakannya peningkatan partisipasi dan peran perempuan diberbagai bidang pembangunan. Diduga bahwa masyarakat saat ini kurang memiliki pemahaman yang memadai tentang konsep gender dan kesetaraan gender. Bertolak dari dugaan tersebut kiranya perlu diadakan suatu penelitian yang berkaitan dengan pemahaman konsep keadilan dan kesetaraan gender. Bilamana hal itu terbukti maka perlu dilakukan langkah-langkah sosialisasi tentang konsep gender, kesetaraan gender dan kebijakan pengarusutamaan gender.

B. Perumusan Masalah.

Upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dilakukan melalui kebijakan dalam rangka melaksanakan pengarusutamaan gender disemua bidang

pembangunan melalui Inpres No. 9 tahun 2000. Ini berarti bahwa instruksi ini perlu diimplementasikan. Dengan demikian pemahaman mengenai konsep keadilan dan kesetaraan gender adalah merupakan prasyarat bagi pelaksanaan Inpres tersebut. Sementara disisi lain diduga masalah gender masih banyak belum dikenal dalam masyarakat. Berkaitan dengan kondisi ini maka peneliti dalam hal ini merumuskan masalah penelitian yang merupakan masalah pokok dalam penelitian ini yaitu : sejauh mana gambaran umum persepsi mahasiswa UPI tentang konsep gender, kesetaraan gender dan kebijaksanaan pengarusutamaan gender .

Secara lebih khusus masalah penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang merupakan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana gambaran umum pemahaman mahasiswa UPI secara keseluruhan mengenai konsep gender, kesetaraan gender serta kebijakan pengarusutamaan gender?
- b. Bagaimanakah gambaran umum pemahaman para mahasiswa dan mahasiswi UPI mengenai konsep gender, kesetaraan gender dan pengarusutamaan gender tersebut
- c. Apakah terdapat perbedaan pemahaman antara mahasiswa dan mahasiswi UPI mengenai konsep gender, kesetaraan gender serta pengarusutamaan gender

C. Tujuan Penelitian :

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi tentang konsep gender, kesetaraan gender dan pengarusutamaan gender pada mahasiswa UPI.

Sedang secara khusus tujuan penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui gambaran umum mengenai pemahaman mahasiswa UPI secara keseluruhan tentang konsep gender, kesetaraan gender dan pengarusutamaan gender pada mahasiswa UPI.
- c. Memperoleh gambaran umum mengenai pemahaman mahasiswa dan mahasiswi UPI tentang konsep gender, kesetaraan gender, dan pengarusutamaan gender pada mahasiswa perempuan UPI
- g. Memperoleh gambaran mengenai perbandingan pemahaman antara mahasiswa dan mahasiswi UPI tentang konsep gender, kesetaraan gender dan pengarusutamaan gender.

B. Manfaat Penelitian :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para penentu kebijakan perlunya perhatian serius terhadap aplikasi pemahaman konsep gender, kesetaraan gender dan kebijakan pengarusutamaan gender. Dalam arti memperhatikan kebutuhan praktis dan strategis kaum perempuan. Disamping itu juga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa untuk menyadari pentingnya memahami tentang konsep tentang gender, kesetaraan gender dan pengarusutamaan gender sebagai bekal apabila mereka telah terjun kekehidupan bermasyarakat. dalam upaya memecahkan masalah kesenjangan gender.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Persepsi

Istilah persepsi , banyak dikemukakan oleh para pakar, mereka memberi batasan-batasan mengenai istilah tersebut antara lain :

Sarlito Wirawan (1983 : 94) mengartikan persepsi sebagai a) suatu proses berfikir, b) proses pengambilan keputusan c) penafsiran terhadap obyek dan d) hasil dari stimulus.

Good, (1973 : 413) Persepsi dapat diartikan sebagai kesadaran individu akan obyek, kondisi atau hubungan-hubungan sebagai rangsangan sensoris

Setiap orang mempunyai persepsi, penafsiran tertentu, kesan tertentu terhadap obyek . Obyek yang sama dapat dilihat sebagai sesuatu yang berbeda-beda, sebab kesan yang ditangkap oleh rangsangan pancaindra dapat berbeda-beda. Penyebab dari perbedaan tersebut dapat terjadi karena latar belakang, pengalaman, pengetahuan, perasaan, pendidikan dan nilai-nilai serta kebiasaan di lingkungan masing-masing.

Demikian pula gambaran yang sudah baku tentang wanita (*stereotype*), seolah-olah demikianlah adanya, tidak mudah untuk diubah. Hal ini merupakan pantulan

dari anggapan yang sudah mengendap mungkin turun temurun berabad-abad, karenanya tak dipikirkan lagi dan diterima begitu saja, dipercaya dan diikuti. Sebagai contoh: wanita adalah makhluk yang lemah, lembut, manja. Wanita tidak mempunyai kemampuan untuk berprestasi baik dalam ilmu eksakta dll. Citra ini sudah terpatri dalam pikiran masyarakat, sukar merubahnya, walaupun pada kenyataannya kita dapat menunjuk adanya banyak yang pandai dalam ilmu eksakta.

Dalam masyarakat , kini anggapan-anggapan tersebut berkembang dan berubah terus menerus, tetapi perubahan tersebut biasanya berjalan lamban, membutuhkan suatu proses yang panjang, yang pada dasarnya adalah suatu proses belajar. Kedudukan dan peranan perempuan dalam pembangunan juga berkembang terus menerus, sehingga ketersediaan kaum wanita untuk belajar terus menerus, mengubah sikap dan tingkah lakunya dalam menjalankan peranannya dalam masyarakat juga berlangsung terus menerus.

Persepsi tentang peningkatan kedudukan dan peranan perempuan dalam pembangunan bangsa didasarkan pada pandangan bahwa perempuan adalah warganegara dan sumber daya insani pembangunan yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, tanggung jawab peranan dan kesempatan yang sama dengan laki laki dalam pembangunan di segala bidang termasuk kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kebijakan peningkatan kedudukan dan peranan perempuan pada hakekatnya diarahkan pada peningkatan kedudukan, peranan kemampuan, kemandirian serta ketahanan mental spiritual agar menjadi mitra sejajar pria yang

selaras, serasi dan seimbang, sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dilihat dari sisi jumlah dan proporsi yang ada, posisi perempuan lebih besar dari laki-laki. Ini berarti bahwa perempuan dapat memberikan sumbangan yang sebanding dengan laki-laki apabila mempunyai kemampuan yang setara. Sementara dilain pihak perempuan diletakkan dalam posisi yang lebih rendah, yang mengakibatkan kemampuan untuk berperan dalam pembangunan menjadi lebih kecil. Pada hakekatnya perempuan dan laki-laki mempunyai kemampuan yang sama kecuali untuk fungsi reproduksinya. Sedangkan perbedaan yang ada disebabkan oleh stereotipe yang secara turun temurun terbentuk dalam tatanan sosial budaya masyarakat. Sejalan dengan perubahan jaman, stereotipe yang memarjinalkan perempuan dan meletakkan perempuan pada kedudukan yang lebih rendah, harus diubah karena tidak sesuai dengan kodrat manusia. Dalam upaya meningkatkan kondisi perempuan yang saat ini masih tertinggal, pemerintah telah menentukan kebijakan tentang kedudukan dan Pemberdayaan Perempuan dengan tujuan terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dalam setiap proses dan tahap pembangunan.

Strategi peningkatan peranan perempuan dalam perkembangannya selama ini lebih menekankan pada kerangka berfikir “wanita dalam pembangunan” (*Women In Development = WID*), dan “Wanita dan Pembangunan” (*Women And Development = WAD*) yang lebih ditujukan pada masalah mengejar ketertinggalan wanita dibanding pria dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Penggunaan paradigma ini lebih banyak menghasilkan program /

proyek khusus untuk wanita (*Specific Womens Programmes / Project*). Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa walaupun berdasarkan paradigma itu telah cukup banyak diperoleh berbagai kemajuan dalam peningkatan kedudukan dan peranan wanita dalam pembangunan, namun demikian upaya tersebut dirasakan masih perlu dilanjutkan dan lebih dikembangkan, serta dimantapkan dan dipercepat dengan menggunakan paradigma baru yaitu gender dan pembangunan "*Gender And Development* " = *GAD*, yang berupaya mendapatkan jalan untuk mengubah ketimpangan gender. Program *GAD* disetujui tahun 1990 hasil dari pertemuan di *Vienna* dengan strategi *gender mainstreaming*. *GAD* menekankan pentingnya perencanaan sensitif gender. Strategi yang terdapat pada *GAD* ialah bekerja ke arah terwujudnya keadilan berkenaan dengan dampak pembangunan. Suatu kerangka dasar konseptual baru yang memungkinkan identifikasi tujuan-tujuan dan penerapan program-program yang memenuhi harapan ini amat diperlukan. Pemikiran tersebut memunculkan ide untuk membawa wanita ke arus utama dan mengupayakan peningkatan kesadaran akan gender.

Masalah –masalah yang harus diatasi serta keterbatasan cara pendekatan *GAD* dalam setiap lingkungan nasional hendaknya disadari oleh para perencana dan pelaksana. Walaupun demikian menurut Sita van Bemmellen , (1995, hal. 178) *GAD* hanya mungkin berhasil jika bagian-bagian yang luas dari masyarakat, terutama pada badan-badan perencana dan badan-badan penentu kebijakan, maupun badan-badan pelaksana , jadi lebih sadar akan perbedaan-perbedaan dan ketimpangan-ketimpangan gender

Secara global disadari bahwa setiap kebijaksanaan dan strategi dalam pembangunan tidak selalu akan memiliki dampak, manfaat dan akibat yang sama terhadap laki-laki dan perempuan. Upaya untuk mewujudkan kondisi normatif dimana laki-laki dan perempuan mempunyai persamaan kedudukan, hak kewajiban, tanggung jawab dan peranan serta kesempatan dalam berbagai bidang kehidupan dan setiap kegiatan dalam pembangunan, tidak mungkin dapat diwujudkan apabila penanganannya hanya ditujukan terhadap perempuan saja tanpa memperhatikan masalah hubungan laki-laki dan perempuan.

B. Konsep Gender.

Kata gender dalam bahasa Indonesia dipinjam dari bahasa Inggris secara harfiah “*gender*” berarti jenis kelamin, sama halnya dengan seks yang juga jenis kelamin. Untuk memahami konsep gender harus dibedakan antara kata gender dengan seks. Seks mengacu pada pengertian perbedaan biologis jenis kelamin yang merupakan kodrat Tuhan karenanya bersifat permanen serta tidak dapat dipertukarkan.

Gender mengacu pada perbedaan jenis kelamin yang bukan bersifat biologis dan bukan kodrat Tuhan. Gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural.

Gender adalah perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya yang dapat diubah sesuai dengan kemajuan zaman. Gender adalah semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki yang bisa berubah dari waktu

ke waktu serta berbeda dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas lainnya. Gender menunjuk pada perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang “ *society constructed*”, jadi diciptakan oleh laki-laki dan perempuan itu sendiri melalui proses sosial budaya yang panjang.

Dalam masyarakat tampak adanya pembagian dua golongan yang membedakan laki-laki perempuan. Hal ini dapat dilihat dari ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk mengidentifikasi dua jenis kelamin tersebut. Sebagai contoh misalnya perempuan dikenal dengan yang berkaitan dengan, bunga, , bulan, lemah, emosional, alam Sedangkan laki-laki berkaitan dengan kumbang, matahari, kuat, rasional, budaya..

Dari dikhotomi tersebut tampak dua sifat yang berlawanan. Lambang yang diberikan pada laki-laki lebih dinamis dibandingkan dengan lambang lambang yang diberikan pada perempuan. Lambang yang dimiliki laki-laki menguasai lambang-lambang yang dimiliki perempuan. Johnson dalam Darwis (2002:3) mengemukakan bahwa nilai-nilai budaya menempatkan kelaki-lakian diatas keperempuanan dan menilai laki-laki dan perempuan dengan kriteria yang berbeda. Identifikasi perempuan dengan alam menunjukkan kedekatannya dengan alam karena keterlibatannya dalam kegiatan reproduksi cenderung membatasi mereka pada fungsi-fungsi sosial tertentu seperti hubungan dengan anak. Pada akhirnya hubungan perempuan anak dan keluarga menempatkannya pada wilayah domestik. Laki-laki ditempatkan pada wilayah politik dan publik dari kehidupan sosial karenanya diidentifikasi dengan masyarakat dan publik, sedangkan perempuan tetap diasosiasikan dengan keluarga. Ciri dan sifat tersebut diatas

sebenarnya tidak permanen dalam arti bisa dipertukarkan , sebagai contoh ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, sebaliknya ada perempuan yang rasional, kuat. Melalui dialektika konstruksi gender yang tersosialisasikan secara evolusional, lama-lama mempengaruhi biologis seks, sehingga kaum laki-laki kemudian terlatih dan tersosialisasi dan termotivasi untuk menjadi sifat gender yang ditentukan masyarakat, yaitu secara fisik lebih kuat dan agresif, sementara perempuan harus lemah lembut. Proses sosialisasi dan rekonstruksi ini berlangsung secara mapan dan lama, yang akhirnya sulit dibedakan apakah sifat gender ini dikonstruksikan oleh masyarakat atau kodrat biologis yang ditentukan Tuhan. Namun demikian sepanjang sifat-sifat yang melekat pada kedua seks ini bisa dipertukarkan , maka sifat tersebut adalah hasil konstruksi masyarakat dan bukanlah kodrat.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa gender adalah perbedaan hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan sebagai konstruksi yang bersumber pada nilai sosial budaya, pada berbagai golongan atau kelompok masyarakat, memiliki identitas yang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh faktor ideologi, politik, ekonomi, sejarah, agama, budaya, adat istiadat dan etnik serta berubah ubah menurut waktu, tempat, lingkungan dan kemajuan

Nilai sosial budaya menentukan peranan stereotip, yaitu peranan yang dianggap cocok bagi laki-laki dan perempuan, sesuai dengan sifat-sifat biologis masing-masing didalam pembangunan termasuk kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sering menimbulkan kesenjangan hubungan laki-laki dan perempuan.

Adanya anggapan bahwa perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin serta tidak cocok menjadi kepala rumah tangga berakibatkan bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan, dan pekerjaan ini dinilai lebih rendah dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan lelaki dengan kategori pekerjaan bukan produktif sehingga tidak diperhitungkan dalam statistik ekonomi negara. Anggapan gender seperti itu membuat kaum perempuan sudah sejak dini disosialisasikan untuk menekuni peran gender mereka. Di lain pihak kaum lelaki tidak diwajibkan untuk menekuni berbagai jenis pekerjaan domestik. Bias gender inilah yang memperkuat pelanggaran secara kultural dan struktural beban kerja kaum perempuan.

“Bias” yang dalam bahasa Inggris diartikan sebagai “prasangka” yaitu pendapat atau anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui/ menyaksikan / menyelidiki sendiri. Secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti yang menyimpang.

Bias gender adalah cara pandang (idea) seorang perempuan terhadap laki-laki sesuai dengan anggapannya yang menyimpang, demikian juga sebaliknya. Prasangka itu sendiri mengandung arti terdapat hal yang tidak obyektif, jadi terdapat persepsi yang tidak obyektif pada diri perempuan maupun laki-laki terhadap lawan jenisnya.

Bias gender telah diyakini kebenarannya oleh laki-laki maupun perempuan dan diterima sebagai kodrat Tuhan yang tidak dapat diubah sehingga menjadi pedoman dalam bertingkah laku dalam keluarga maupun masyarakat yang lebih luas.

Perbedaan gender tidak menjadi masalah selama tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*).Namun ternyata perbedaan gender seringkali melahirkan ketidakadilan baik bagi laki-laki maupun perempuan Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.

Ketidakadilan Gender adalah bahwa :

- :1) Perlakuan tidak adil yang diberikan baik kepada laki-laki maupun perempuan.
- 2) Dalam banyak kasus perlakuan tidak adil banyak menimpa perempuan yang dialaminya baik di rumah, di tempat bekerja maupun di masyarakat.
- 3) Ketidakadilan gender tercipta karena : a) hubungan gender yang timpang b) diskriminasi gender. Dikonstruksikan oleh budaya dan melembaga / dilembagakan.
- 6) Apabila proses ketidakadilan gender terus berlanjut, kesetaraan gender tidak tercapai.

Manifestasi ketidakadilan gender menurut beberapa pakar (Zoerani 2001: 2) timbul dalam bentuk :

- 13) Kekerasan (*violence*)
- 14) Marginalisasi. Perempuan
- 15) Subordinasi
- 16) Pembentukan stereotip atau pelabelan negatif
- 17) Beban kerja lebih panjang dan lebih banyak
- 18) Peran ganda

C. Kesetaraan Gender adalah :

Kesetaraan gender adalah kesetaraan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut

Jadi kesetaraan gender adalah menerima dan menilai secara setara :

- 13) perbedaan antara laki-laki dan perempuan
- 14) perbedaan peran yang dipegang oleh laki-laki dan perempuan dalam masyarakat
- 15) memahami bahwa kondisi hidup laki-laki dan perempuan pada dasarnya karena fungsi melahirkan pada perempuan.
- 16) Menerima perbedaan laki-laki dan perempuan sebagai hikmah
- 17) Kesetaraan gender tidak sinonim dengan persamaan
- 18) Kesetaraan gender berarti sederajat dalam keberadaan, sederajat dalam keberdayaan dan keikutsertaan disemua bidang kehidupan domestik dan publik

D. Pengarusutamaan gender, (PUG), Gender Mainstreaming.

Pengarusutamaan gender yang saat ini menjadi garis kebijakan yang ditegaskan melalui INPRES No. 9 tahun 2000. Dalam Inpres tersebut dinyatakan bahwa pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan,

penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.

Tujuan pengarusutamaan gender ini adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pengarusutamaan gender telah diadopsi secara resmi di Indonesia sejak tahun 2000 dengan keluarnya Instruksi Presiden atau Inpres No.9 Tahun 2000. Kemunculan dasar hukum ini merupakan satu bentuk komitmen pemerintah Indonesia untuk mengikuti kesepakatan Internasional, serta desakan masyarakat sipil agar pemerintah melakukan tindakan-tindakan konkrit dan sistematis dalam mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender

Konsep PUG pertama kali muncul saat Konferensi PBB untuk Perempuan IV di Beijing tahun 1995. PUG terjemahan dari bahasa Inggris *gender mainstreaming*. Menurut definisi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB *gender mainstreaming* adalah strategi agar kebutuhan dan pengalaman perempuan dan laki-laki menjadi bagian tak terpisahkan dari desain, Implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan dan program dalam seluruh lingkup politik, ekonomi, dan sosial sehingga perempuan dan laki-laki sama-sama mendapatkan keuntungan, dan ketidakadilan tak ada lagi. Titik tolak utama dalam PUG adalah analisa yang menyeluruh terhadap situasi pembangunan. Menurut Hartian Silawati (2006: 19) ada tiga prinsip utama dibelakang PUG yaitu :

a. Menumbuhkan individu sebagai manusia seutuhnya, prinsip ini berasal dari paradigma *politics of difference* (politik perbedaan) yang melihat laki-laki dan perempuan sebagai orang yang mampu memikul tanggung jawab masing-masing. Kemanusiaan laki-laki dan perempuan harus mendapatkan penghargaan dan penghormatan yang sama kerana mereka sama-sama lahir sebagai manusia, yang berhak untuk hidup dengan mulia. Hal ini sesuai dengan prinsip Hak Azasi Manusia yang menganggap laki-laki dan perempuan sebagai manusia yang sama sama memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi.

h. Demokrasi. Perlu diselenggarakan forum-forum dimana perempuan dan laki-laki dapat menyuarakan kebutuhan dan aspirasinya . Merekalah yang bisa memastikan agar sumber daya dialokasikan berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan.

i. *Fairness, justice, dan equity*.

Inti dari prinsip *fairness, justice dan equity* (pemerataan, penegakan hukum dan kesetaraan) ini adalah yang disebut keadilan sosial. Inilah alasan utama mengapa PUG harus dilakukan. Prinsip ini mengakui adanya ketidakadilan sosial dalam pengalokasian sumber daya, yang akan memudahkan kita melakukan langkah-langkah untuk menghilangkannya.

Dari tiga prinsip diatas, jelas bahwa keadilan gender adalah nilai fundamental dalam pemenuhan dan promosi hak-hak asasi manusia. Mengarusutamakan keadilan gender berarti membawa laki-laki dan perempuan ke dalam proses pengambilan keputusan tentang alokasi sumber daya dan manfaat pembangunan.

Menurut Drs. Maulana.T.Hasyim, MSc manfaat PUG adalah :

- j. Pemerintah dapat bekerja lebih efisien dan efektif dalam menerbitkan kebijakan-kebijakan publik yang adil dan responsif gender, perempuan dan laki-laki.
- k. Kebijakan dan pelayanan publik serta program dan perundangan-undangan yang adil dan responsif gender akan membuahkan manfaat yang adil bagi semua rakyat perempuan dan laki-laki.
- l. PUG merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama dimasyarakat.
- m. PUG mengantar kepada pencapaian kesetaraan gender dan karenanya PUG meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah.
- n. Keberhasilan pelaksanaan PUG memperkuat kehidupan sosial politik dan ekonomi suatu bangsa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Sesuai dengan permasalahan serta tujuan yang dikemukakan dalam penelitian ini yaitu untuk memperoleh gambaran umum mengenai persepsi mahasiswa tentang gender, kesetaraan gender serta pengarusutamaan gender, jadi dimaksudkan untuk memperoleh gambaran kondisi sekarang maka metode yang digunakan adalah metode deskriptif, dengan pendekatan kuantitatif.

B. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Teknik pengumpulan data tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa kuesioner merupakan alat yang efisien dan efektif dalam menjaring data yang obyektif.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa UPI Bandung. Dalam menetapkan sampel dengan mempertimbangkan tersedianya waktu dan dana maka peneliti dalam kesempatan ini menentukan sampel secara acak sebanyak empat fakultas yaitu: FIP, FPBS, FPMIPA dan FPTK, yang dianggap dapat mewakili dari enam fakultas yang ada. Dari tiap fakultas yang dijadikan sampel tersebut,

ditentukan satu jurusan yang mewakili, dan terambil jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Pendidikan Seni Rupa, Pendidikan Biologi, dan jurusan Pendidikan Teknik Mesin. Dari tiap jurusan diwakili oleh responden dari mahasiswa semester lima, yaitu dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah berjumlah 39 orang, dari jurusan Pendidikan Seni Rupa berjumlah 44 orang, dari jurusan Pendidikan Biologi berjumlah 59 orang serta dari jurusan Pendidikan Teknik Mesin berjumlah 19 orang, sehingga jumlah sampel seluruhnya adalah 161 orang. Setelah dipilah-pilah antara perempuan dan laki-laki, diperoleh jumlah perempuan sebanyak 102 orang dan laki-laki sebanyak 59 orang.

D. Pengolahan data

Pengolahan data dianalisis secara kuantitatif dengan perhitungan persentase melalui tahapan : tabulasi, penafsiran data kuantitatif dan pembahasan. Dalam mentabulasi data yang terkumpul sesuai dengan tujuan penelitian, data kolektif tersebut ditabulasi secara keseluruhan dan kemudian dianalisis secara keseluruhan dan secara terpilah-pilah menurut jenis kelamin perempuan dan laki-laki.

Hasil analisis ditampilkan dalam bentuk tabel-tabel distribusi frekuensi. Penafsiran data dalam penelitian ini berpedoman pada batasan presentase yang diperoleh dari hasil lokakarya jurusan Adpen FIP, IKIP yang dikutip oleh Supriadi (1994 : 74)

100 %	=	Seluruhnya
76 % - 99 %	=	Sebagian besar
51 % - 75 %	=	Lebih dari setengahnya

50 %	= Setengahnya
26 % - 49 %	= Kurang dari setengahnya
1 % - 25 %	= Sebagian kecil
0 %	= Tidak seorangpun

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis data.

Dari hasil analisis data yang diberikan responden melalui angket, diperoleh sejumlah jawaban mengenai topik-topik permasalahan yang diolah melalui tahapan : tabulasi, penafsiran data yang kemudian dikaji. Hasil analisis dijadikan dasar dalam menyusun temuan penelitian ini , yang kemudian ditarik kesimpulan penelitian serta rekomendasi sehubungan dengan kesimpulan tersebut. Data yang diperoleh melalui angket ini adalah mengenai persepsi mahasiswa UPI mengenai konsep Gender, kesetaraan gender serta pengarusutamaan gender.

B. Pembahasan hasil temuan.

1. Mengenai sering tidaknya membaca buku yang berkaitan dengan gender dari hasil analisis data dapat dikemukakan bahwa 65,84 % mahasiswa UPI jarang membaca buku-buku mengenai gender, 29,19 % tidak pernah dan 4,97 % sering.

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa jarang membaca buku mengenai gender, Kurang dari setengahnya tidak pernah, hanya sebagian kecil yang sering membaca buku.. Apabila dipilah antara mahasiswa perempuan dan laki-laki dapat dikemukakan bahwa perempuan lebih banyak persentase jarang membaca mengenai gender dibanding laki-laki.

2. Jika suka membaca buku mengenai gender cara mendapatkannya ialah dengan cara meminjam dari teman 62,92 % meminjam dari perpustakaan 24,08 % dan 12,96 % dengan cara membeli. Dari data tersebut diatas dapat dikatakan bahwa mahasiswa UPI yang suka membaca buku-buku mengenai gender sebagian besar memperolehnya dengan cara meminjam dari temannya, sebagian kecil dengan cara meminjam dari perpustakaan atau membeli.

3. Pandangan mengenai pengertian gender bagi mahasiswa. Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa 49,07 % responden (perempuan 31,68 %.laki-laki 17,39 %) menyatakan bahwa gender adalah perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang ditentukan oleh nilai-nilai sosial budaya yang bisa berubah atau diubah. Kemudian sebesar 34,16 % responden (perempuan 19,25% laki-laki 14,91%)menyatakan bahwa gender adalah jenis kelamin.Dan sebagian kecil yaitu 16,77 % responden (perempuan 12,42%, laki-laki 4,35%) menyatakan bahwa gender adalah kebebasan perempuan untuk berkiprah dalam berbagai aspek kegiatan masyarakat.

Dari temuan diatas dapat dikatakan bahwa pandangan mengenai pengertian gender bervariasi tetapi hampir setengahnya responden memberi pernyataan mengenai pengertian gender adalah bahwa gender adalah perbedaan peran,fungsi. tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang ditentukan oleh nilai-nilai sosial budaya yang bisa berubah atau diubah.

Apabila dipilah antara perempuan dan laki-laki ternyata responden perempuan lebih besar dalam perolehan persentasenya dibandingkan laki-laki.

4. Mengenai pandangan kesetaraan gender, dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa pandangan responden juga bervariasi. Hampir setengah responden yaitu 47,83 % (31.68% perempuan dan 16,15% laki-laki) menyatakan bahwa kesetaraan gender adalah persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Dan hampir setengahnya pula yaitu 37.89% responden (perempuan 22.98% laki-laki 14.91%) menyatakan bahwa kesetaraan gender adalah kemitrasejajaran antara perempuan dan laki-laki dan selebihnya, 14,28 % (perempuan 8.70% dan laki-laki 5.58%) responden menyatakan bahwa kesetaraan gender adalah tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki –laki disegala bidang.

Dari hasil temuan diatas ternyata paling banyak responden memberi pandangannya bahwa kesetaraan gender adalah persamaan hak antara perempuan dan laki-laki. Dan apabila dipilah antara laki-laki dan perempuan ternyata juga perolehan responden perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki.

5. Mengenai pandangan ketidaksetaraan gender bagi responden, dari data yang terkumpul ternyata sebagian besar responden yaitu 67,70 % (44.72% perempuan, laki-laki 22.98%) menyatakan bahwa pandangan ketidaksetaraan gender adalah ketidakberdayaan perempuan dalam bersikap dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian hampir setengah dari responden yaitu 26,71% (16.77% perempuan, laki-laki 9.94%) menyatakan bahwa ketidak setaraan gender adalah persepsi menang kalah antara perempuan dan laki-laki dan selebihnya yaitu 5,59 % (1.86% perempuan dan 3.73% laki-laki menyatakan sikap acuh tak acuh perempuan terhadap keberadaan dirinya.

Dari temuan diatas dapat dikemukakan bahwa pandangan sebagian besar responden mengenai ketidaksetaraan gender adalah ketidakberdayaan perempuan dalam bersikap dibandingkan dengan laki-laki. Apabila dibandingkan antara perempuan dan laki-laki ternyata juga perolehan persentase bagi responden perempuan lebih besar dibandingkan dengan responden laki-laki.

6. Terhadap pandangan setuju atau tidak setuju terhadap konsep kesetaraan gender ternyata sebagian besar yaitu 79,50 % responden (perempuan 56.52%, laki-laki 22.98%) menyatakan setuju dengan adanya konsep kesetaraan gender. Selebihnya yaitu sebesar 20,50 % tidak setuju.. Dari temuan diatas dapat diperoleh gambaran bahwa kebanyakan responden setuju terhadap adanya konsep kesetaraan gender. Dan kalau dipilah antara perempuan dan laki-laki ternyata perolehan persentase responden perempuan yang setuju juga lebih besar dibandingkan dengan laki-laki.

7. Alasan setuju terhadap adanya konsep gender, dari hasil pengolahan data ternyata 50% responden (perempuan 35.94% dan laki-laki 14.06%) memberi alasan karena ada perasaan saling menunjang di segala bidang antara perempuan dan laki-laki. Selebihnya 39,84 % responden (perempuan 29.69% ,laki-laki 10.15 %) memberi alasan karena menyadari kewajiban masing-masing. Dan 10,16 % memberi alasan karena saling menghargai antara perempuan dan laki-laki.

Dari temuan diatas diperoleh gambaran bahwa kebanyakan responden setuju terhadap kesetaraan gender karena ada perasaan saling menunjang di segala bidang antara perempuan dan laki-laki. Apabila dibandingkan antara responden

perempuan dan laki-laki ternyata juga responden perempuan memperoleh persentase yang lebih besar daripada laki-laki .

8. Sementara alasan yang dikemukakan atas ketidaksetujuan responden terhadap kesetaraan gender ternyata dari hasil pengolahan data diperoleh temuan, bahwa dari seluruh jumlah responden yang tidak setuju ternyata laki-laki lebih besar jumlahnya dibandingkan perempuan. Dari jumlah tersebut 36,36% responden (perempuan 9.09%, laki-laki 27.27%), memberi alasan karena perempuan akan merasa tidak risi lagi menghadapi laki-laki. Kemudian 33,34 % (perempuan 9.09% dan laki-laki 27.27%)memberi alasan tidak usah dipermasalahkan, serta 33,30 % (perempuan 15.15% dan laki-laki juga 15.15%) menyebutkan alasannya karena pria akan merasa berkurang kewibawaannya.

Dari hasil temuan diatas diatas dapat dikatakan bahwa ternyata jawaban responden bervariasi terhadap alasan ketidaksetujuan terhadap adanya konsep kesetaraan gender yaitu bahwa ketidak setujuan laki-laki disebabkan karena perempuan akan merasa tidak risi lagi menghadapi laki-laki, pria merasa berkurang kewibawaannya, serta tidak perlu dipermasalahkan.

Alasan yang paling banyak dikemukakan adalah karena perempuan akan merasa tidak risi lagi menghadapi laki-laki. Apabila dibandingkan antara responden perempuan dan laki-laki terhadap ketidaksetujuan ini ternyata untuk alasan bahwa perempuan merasa tidak risi lagi menghadapi laki laki perolehan persentase laki-laki lebih besar dibandingkan dengan perolehan persentase perempuan

9. Pendapat mengenai setuju tidaknya apabila perempuan banyak berkiprah

di bidang politik. Ternyata dari hasil pengolahan data sebagian besar 60,25% responden (45.96% perempuan, laki-laki 14,29 %) menyatakan setuju apabila perempuan banyak berkiprah di bidang politik dan selebihnya 39,75 % (perempuan 17.39% laki-laki 22.36%) tidak setuju. Apabila dipilah antara responden perempuan dan laki-laki ternyata perolehan persentase responden perempuan lebih besar kesetujuannya dibandingkan responden laki-laki. Sementara untuk jawaban tidak setuju dari hasil pengolahan data ternyata responden laki-laki perolehan persentasenya lebih besar dibanding kan dengan perolehan persentase perempuan.

10. Alasan setuju apabila perempuan banyak berkiprah di bidang politik, ternyata 61.86% responden (44,33% perempuan, 17,53% laki-laki) memberi alasan karena adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan , selebihnya yaitu 34,02 % (perempuan 28.87%, laki-laki 5.15%) memberi alasan karena tidak akan ada dominasi antara perempuan dan laki-laki, serta 4,12 % memberi alasan karena perempuan merasa percaya diri.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa sebagian besar mahasiswa UPI setuju apabila perempuan berkiprah dibidang politik dan hampir setengahnya dari yang setuju itu adalah perempuan dan alasan yang diberikan atas kesetujuannya paling banyak adalah karena adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

11. Sementara alasan tidak setuju apabila perempuan banyak berkiprah di bidang politik, dari hasil pengolahan data ternyata alasan yang diberikan adalah karena banyak menyerap waktu untuk keluarga (68,75%). Jumlah ini berasal dari 35.94% perempuan dan 32,81% laki-laki. Kemudian 17,19 % responden (laki-laki 14.06%

perempuan 3.12%) memberi alasan karena percaya diri perempuan terlalu menonjol dan selebihnya 14,06 % (9.38% laki-laki dan perempuan 3.12%) memberi alasan karena melelahkan fisik dan mental.

Dari uraian diatas dapat dikemukakan bahwa dari jumlah responden yang tidak setuju paling banyak memberi alasan ketidaksetujuannya apabila perempuan berkiprah dibidang politik adalah karena banyak menyerap waktu keluarga. Sementara apabila dibandingkan antara perempuan dan laki-laki, persentase laki-laki lebih besar dibandingkan dengan perempuan.

12. Pendapat responden kalau istri lebih besar penghasilannya

Dari hasil pengolahan data ternyata 44.72% responden (22,98% perempuan, 18.01% laki-laki) menyatakan tetap berharap suami lebih besar penghasilannya. Kemudian 40,99% (33.54%perempuan, 11.18% laki-laki) menyatakan salut dan bangga, serta selebihnya 14.29% (7.46% laki-laki, 6.83% perempuan) menyatakan istri suka sombong.

Dari temuan diatas dapat dikatakanbahwa hampir setengah dari responden menyatakan tetap berharap suami lebih besar penghasilannya daripada istri.Sementara apabila dibandingkan antara perempuan dan laki-laki ternyata perempuan lebih besar persentasenya dibandingkan dengan laki-laki.

13. Pendapat responden dalam hal apabila perempuan menjadi penjabat pada suatu instansi .

Dari hasil pengolahan data ternyata 63.35% responden (yaitu 44,72% perempuan,18.63% laki-laki) menyatakan salut dan bangga, kemudian 33,54% (18.01% perempuan, 15.53% laki-laki) menyatakan biasa-biasa saja, serta selebihnya yaitu 3.11% (0.62% perempuan, 2.49% laki-laki) menyatakan

risi dan kaku. Dari temuan diatas dapat dikatakan bahwa jawaban responden bervariasi. Yang paling banyak adalah menyatakan salut dan bangga apabila perempuan menjadi pejabat pada suatu instansi. Dan apabila dipilah antara perempuan dan laki-laki ternyata bahwa perolehan persentase perempuan lebih besar daripada perolehan laki-laki.

14. Pendapat responden apabila dalam suatu keluarga istri lebih tinggi kedudukan sosialnya dari suami.

Dari hasil pengolahan data yang terkumpul ternyata 92,55% responden (59.63% responden perempuan, 32.92% laki-laki) menyatakan bahwa suami tetap dominan sebagai kepala keluarga, selebihnya yaitu 6,83% (3.11% perempuan, 3.73% laki-laki) menyatakan bahwa istri lebih dominan dari suami dan sebesar 0,62% (0.62% responden perempuan), menyatakan semua keputusan mengenai masalah keluarga ditentukan oleh istri.

Dari temuan diatas dapat dikatakan bahwa hampir seluruh responden menyatakan bahwa apabila dalam satu keluarga istri lebih tinggi kedudukan sosialnya akan tetap berharap suami tetap dominan sebagai kepala keluarga. Dan apabila dipilah antara perempuan dan laki-laki ternyata juga perolehan persentase perempuan lebih besar dibandingkan dengan perolehan persentase laki-laki.

15. Dalam hal perlu tidaknya perempuan diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam kegiatan pembangunan. Dari hasil pengolahan data yang terkumpul ternyata 92,55% responden (60.87% perempuan, 31.68% laki-laki) menyatakan bahwa hal tersebut diperlukan. Sementara selebihnya yaitu sebesar 7,45% responden (4.97% perempuan, 2.48% laki-laki) menyatakan bahwa

pemberian kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki tidak diperlukan. Dari hasil temuan diatas diperoleh gambaran bahwa sebagian besar responden menyatakan perempuan perlu diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam kegiatan pembangunan. Perolehan ini apabila dipilah ternyata perolehan persentase perempuan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki.

16. Alasan responden apabila perempuan perlu diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam kegiatan pembangunan. Dari hasil pengolahan data ternyata 51,68% responden (perempuan 31.54%, laki-laki 20.14%) memberikan alasan bahwa hal tersebut diperlukan karena perempuan sama haknya.dengan laki-laki. Selebihnya yaitu sebesar 27.51% (perempuan 19.46%, laki-laki 8.05%) menyebutkan alasannya ialah bahwa persoalan pemberdayaan perempuan pada masyarakat Indonesia telah menjadi doktrin negara. Dan sebagian kecil lainnya yaitu sebesar 20,81% (perempuan 14.77% laki-laki 6.04%) menyebutkan alasannya bahwa perempuan merupakan bagian terbesar dari penduduk Indonesia sehingga perlu diberikan kesempatan yang sama dalam kegiatan pembangunan.

Dari temuan diatas dapat dikatakan paling banyak responden memberi alasan apabila perempuan perlu diberikan kesempatan yang sama dalam kegiatan pembangunan, adalah karena perempuan sama haknya dengan laki-laki . Dan kalau dipilah antara laki-laki dan perempuan ternyata perempuan lebih besar perolehan presentasinya dibanding laki-laki.

17. Sementara terhadap alasan responden apabila perempuan tidak perlu diberikan kesempatan yang sama dalam kegiatan pembangunan, berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh gambaran bahwa 50% (33.34% laki-laki, 16.67%

perempuan) dari jumlah responden yang tidak setuju (12 orang) memberikan alasan karena kurangnya kebijakan -kebijakan publik yang nyata. Selebihnya 33.33% (laki-laki 25%, perempuan 8.33%), memberikan alasan yaitu karena terikat waktu. Dan selebihnya pula sebesar 16,66% menyebutkan alasannya adalah karena kemampuan perempuan terbatas, dan ini dikemukakan oleh 8,33% responden perempuan, maupun responden laki-laki. Dari temuan diatas dapat dikatakan alasan yang dikemukakan bahwa perempuan tidak perlu diberikan kesempatan yang sama dalam kegiatan pembangunan adalah karena kurangnya kebijakan –kebijakan publik yang nyata, terikat waktu dan kemampuan perempuan terbatas. Yang paling banyak adalah kurangnya kebijakan-kebijakan publik. Dan apabila dipilah antara laki-laki dan perempuan ternyata laki-laki lebih banyak persentasenya dibandingkan dengan laki-laki.

18. Pendapat responden tentang kebijakan pengarusutamaan gender . Dari hasil pengolahan data diperoleh hasil bahwa 70.81%(46.58% perempuan,24.23 laki-laki menyebutkan bahwa pengarusutamaan gender adalah menetapkan langkah-langkah strategis dalam upaya untuk lebih meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan.Selebihnya sebagian kecil responden yaitu 12,42% menyebutkan bahwa kebijakan pengarusutamaan gender adalah meningkatkan sikap yang penuh inisiatif kaum perempuan. Dan sebagian kecil lainnya yaitu sebesar 10.56% menyebutkan pengarusutamaan gender adalah meningkatkan fisik dan intelektual kaum perempuan. Serta sebanyak 6.21% responden tidak menjawab. Dari uraian diatas dapat dikemukakan bahwa sebagian besar responden menyebutkan bahwa pengarusutamaan gender adalah

menetapkan langkah-langkah strategis dalam upaya untuk lebih meningkatkan pemberdayaan perempuan dan laki-laki. Apabila dipilah antara laki-laki dan perempuan perolehan persentase perempuan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki.

19. Dalam hal setuju tidaknya responden terhadap adanya penerapan pengarusutamaan gender apabila responden telah bekerja. Dari hasil pengolahan data ternyata sebagian besar responden yaitu 68.32% setuju terhadap adanya penerapan pengarusutamaan gender apabila responden telah bekerja. Perolehan ini apabila dipilah antara laki-laki dan perempuan ternyata perempuan lebih besar persentasenya yaitu 47,83% dibandingkan dengan laki-laki yaitu sebesar 20.50%. Sementara yang tidak setuju terhadap penerapan pengarusutamaan gender adalah sebesar 26.09%. Perolehan ini berasal dari 13,66% perempuan dan 12.42% laki-laki. Dan selebihnya yaitu sebesar 5,59% tidak memberi jawaban.

20. Dalam hal apabila responden sudah bekerja apakah responden setuju terhadap pemberian peran yang signifikan kepada perempuan. Dari hasil pengolahan data diperoleh gambaran bahwa sebagian besar responden yaitu 63.98% setuju, karena sesuai dengan doktrin negara. Perolehan ini berasal dari 46,58% perempuan. lebih besar dari perolehan responden laki-laki yaitu sebesar 17.39%. Selebihnya yaitu sebesar 23,60% tidak setuju karena sesuai dengan kebijakan publik yang nyata. Perolehan ini ternyata berasal dari 12,42% responden laki-laki, lebih besar dibandingkan dengan responden perempuan yaitu 11.18%. Serta sebesar 12,42% responden tidak menjawab, dan perolehan ini ternyata perolehan responden laki-laki lebih besar 6,84% dibandingkan dengan perempuan yaitu sebesar 5,59%.

21. Mengenai pendapat responden tentang isue perempuan yang menuntut 30% posisi jabatan di instansi tempat bekerja. Dari hasil pengolahan data ternyata sebagian besar responden yaitu sebesar 67,08% setuju. Perolehan ini apabila dipilah antara perempuan dan laki-laki ternyata perolehan perempuan yaitu 47,20% lebih besar dari perolehan laki-laki yaitu 19,87%. Selebihnya yaitu sebesar 29.81% tidak setuju terhadap isue tersebut. Dan hal ni apabila dipilah antara laki-laki dan perempuan ternyata responden laki-laki lebih besar yaitu 16,78% perolehannya dibanding perempuan yaitu sebesar 13.04%. Sementara yang tidak menjawab sebesar 3.11%.

22. .Dalam hal mengenai pendapat responden tentang apabila sesudah adanya kesetaraan gender dan kebijakan pengarusutamaan gender maka persentase perempuan menduduki jabatan ada perubahan, ternyata sebagian besar responden yaitu 73,29% setuju. Perolehan ini apabila dibandingkan antara perolehan perempuan dan laki-laki ternyata perempuan lebih besar yaitu 49.07% dibandingkan dengan laki-laki yaitu sebesar 11.80%. Kemudian responden yang tidak setuju adalah sebagian kecil yaitu sebesar 22.36%. Perolehan ini apabila dipilah ternyata sebesar 16.78% berasal dari responden laki-laki serta lebih besar dari perolehan perempuan yaitu sebesar 10.56%. Sedang selebihnya yaitu 4.35% responden tidak memberi jawaban.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada umumnya mahasiswa UPI cukup memahami tentang konsep gender, kesetaraan gender serta pengarusutamaan gender. Tetapi apabila dipilah antara perempuan dan laki-laki tampaknya perempuan lebih memahami dibanding laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis data. Dalam hal pengertian gender masih terdapat pendapat yang bervariasi, hal ini menandakan masih adanya pemahaman yang beragam tentang konsep gender. Dalam hal setuju tidaknya terhadap kesetaraan gender, masih ada yang masih menyebutkan tidak setuju meskipun jumlahnya sedikit yaitu 20,50 % dan kalau diselusuri dari jumlah tersebut laki-laki lebih besar persentasenya (13.67%) dibanding perempuan (6.83%). Dan ketidaksetujuan ini disebabkan paling banyak laki-laki menyebutkan karena perempuan akan merasa tidak risi lagi menghadapi laki-laki. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa masih terdapat budaya patriarki, yang menganggap perempuan harus merasa risi menghadapi laki-laki, pria harus lebih berwibawa, dibanding perempuan, dimana hal tersebut tidak seharusnya terjadi apabila telah memahami konsep gender.

Demikian juga dalam hal apabila perempuan berkiprah dibidang politik, masih ada yang menyatakan tidak setuju (39.75%) Dan ini berasal dari 17,39% perempuan dan 22.36% laki-laki. Alasan ketidak setujuan itu adalah bahwa hal ini akan banyak menyerap waktu untuk keluarga. Alasan yang disebutkan diatas menyimpulkan bahwa masih tampak anggapan bahwa perempuan harus sepenuhnya untuk keluarga sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan-kegiatan diluar rumah, . Kondisi ini juga tidak terlepas dari streotipe bahwa politik itu urusan laki-laki. Laki-laki ditempatkan pada wilayah politik dan publik dari kehidupan sosial karenanya diidentifikasi dengan masyarakat dan publik, sedangkan perempuan tetap diasosiasikan dengan keluarga. Dengan demikian aspirasi perempuan yang memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender akan tidak muncul kepermukaan.

Mengenai kebijakan pengarusutamaan gender lebih dari setengah responden (68.32%) menyatakan setuju terhadap adanya penerapan pengarusutamaan gender, dan kurang dari setengahnya (26.09%) tidak setuju serta 5,59% tidak menjawab. Melihat kondisi diatas dapat dikatakan bahwa belum semua responden menyetujui terhadap adanya penerapan pengarusutamaan gender.

Hal ini merupakan hal yang harus diselusuri lebih dalam

Pada akhirnya dapat dikatakan bahwa pada umumnya secara konseptual mereka menyadari tentang konsep kesetaraan gender ataupun pengarusutamaan gender tetapi pada kenyataannya persepsi mereka masih terpengaruh budaya dominasi laki-laki .

B. Saran-saran.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka disarankan sebagai berikut :

- Sehubungan belum memadainya pemahaman mengenai tentang konsep gender, kesetaraan gender serta pengarusutamaan gender maka disarankan untuk mengadakan sosialisasi gender bagi mahasiswa melalui penataran-penataran ataupun pelatihan-pelatihan mengenai gender.
- Sosialisasi gender ini dapat juga diadakan melalui kegiatan belajar mengajar, dimana dalam proses belajar mengajar kepada pengajar disarankan untuk memasukkan konsep gender, kesetaraan gender dan pengarusutamaan gender, sehingga meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan.
- Sosialisasi gender dapat juga dengan cara mengadakan matakuliah yang berkaitan dengan studi kajian wanita dalam kurikulum